
LAPORAN KINERJA 2024



**SEKRETARIAT
DEPUTI BIDANG
PEMBUDAYAAN
OLAHRAGA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 di lingkungan unit kerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media informasi dan pola pengukuran akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagaimana yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi guna mewujudkan visi Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga diukur berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024. Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan dapat meningkatkan kinerja unit secara menyeluruh dengan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya demi mewujudkan Tata Kelola yang baik di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

Jakarta, 15 Januari 2025
Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan
Olahraga

Aris Subiyono, S. H.

NIP 196504271991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
IKHTISAR EKSEKUTIF(EXECUTIVE SUMMARY)	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur	5
1.4 Potensi Permasalahan.....	6
1.5 Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis 2020-2024 dan Pohon Kinerja.....	8
II.2 Rencana Kerja.....	9
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
II.4 Perjanjian Kinerja	12
II.5 Postur Anggaran.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Pengukuran Kinerja	15
III.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
III.3 Realisasi Anggaran	19
III.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	19
BAB IV PENUTUP.....	71
IV.1 Kesimpulan.....	15
IV.2 Saran.....	15

IKHTISAR EKSEKUTIF (Executive Summary)

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat Laporan Kinerja (LKj) untuk mengukur capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan kinerja merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) juga diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua dokumen tersebut serta visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Sebagai unit kerja dalam lingkup Eselon-II Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang dirincikan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	75	83,45	112,67%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	91	76,48	84%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	92	89,10	96,85%

		Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75	78,31	104,41%
		Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	99%	99,31%	100,31%
		Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	93,99%	93,99%
		Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	80%	100%
		Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	76,32	95,40%
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	81,80%	102,25%
		Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%

	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	85	76,17	89,61%
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	90	89,83	99,81%

Dari sasaran yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai 16 capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dihitung secara umum 102% atau berkategori Sangat Baik.

Dalam capaian realisasi anggaran, dari pagu sebesar Rp5.000.000.000 (enam milyar rupiah) dengan realisasi daya serap berdasarkan asumsi kegiatan yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp4.994.036.083 (99,88%).

Oleh karena itu, Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah memenuhi target maupun sasaran program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu cara yang dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Terkait dengan pelayanan keolahragaan, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga. Dengan demikian, untuk kelancaran pelaksanaan tugas ke deputian diperlukan satu unit kerja untuk melaksanakan koordinasi dan dukungan administrasi, maka dibentuklah unit kerja kesekretariatan yang disebut Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki tugas utama melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga ini mengacu pada peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenpanRB No. 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja dimaksud memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai sarana bagi Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi (LKj) Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Untuk lebih jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mengacu dan berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan Laporan Kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

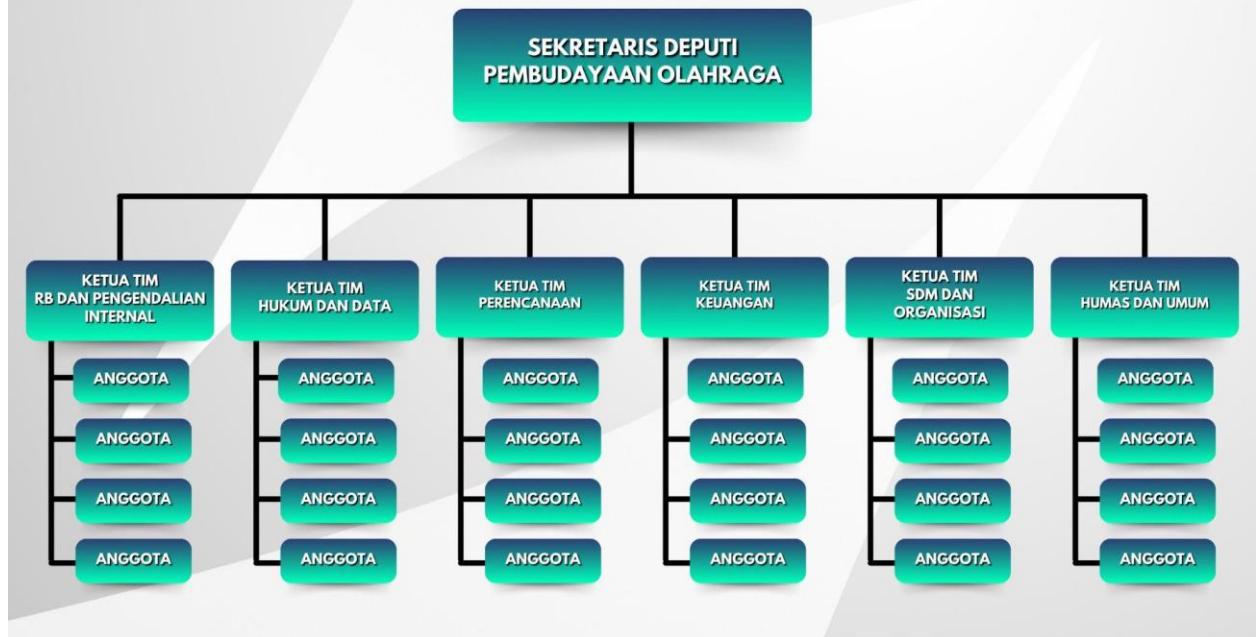
- Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy III, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputy III menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputy;
- b. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy
- c. Penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputy;
- d. Pengelolaan keuangan Deputy;
- e. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan;
- f. Penyusunan laporan Deputy; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TAHUN 2024



1. Rincian Struktur Organisasi Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Deputy yang terdiri atas seorang sekretaris
 - b. Tim Perencanaan terdiri dari :
 - a) Ketua Tim : Perencana Ahli Madya (1 Orang)
 - b) Anggota Tim :
 - Perencana Ahli Madya (1 Orang)
 - Perencana Ahli Muda (1 Orang)
 - Perencana Ahli Pertama (2 Orang)
 - Pranata Keuangan APBN Terampil (2 Orang)
 - Pengolah Data dan Informasi (1 Orang)
 - c. Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri dari:
 - a) Ketua Tim : Perencana Ahli Madya (1 Orang)
 - b) Anggota Tim :
 - Perencana Ahli Madya (1 Orang)
 - Analis SDM Aparatur Ahli Muda (2 Orang)
 - Analis Ahli Pertama Sumber Daya Manusia dan Aparatur (1 Orang)
 - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (1 Orang)

- Pengadministrasian Perkantoran (2 Orang)
- d. Tim Kerja Humas dan Umum terdiri dari:
 - a) Ketua Tim: Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (1 Orang)
 - b) Anggota Tim :
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (1 Orang)
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 Orang)
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (1 Orang)
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama (2 Orang)
 - Pranata Komputer Terampil (1 Orang)
 - Staf Kehumasan (1 Orang)
- e. Tim Kerja Hukum dan Data terdiri dari:
 - a) Ketua Tim : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (1 Orang)
 - b) Anggota Tim :
 - Analis Hukum Ahli Pertama (1 Orang)
 - Pengadministrasi Perkantoran (1 Orang)
 - Pranata Komputer Terampil (2 Orang)
- f. Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Internal terdiri dari:
 - a) Ketua Tim: Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (1 Orang)
 - b) Anggota Tim:
 - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (1 Orang)
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 Orang)
 - Pranata Keuangan APBN Terampil (1 Orang)
 - Analis Ahli Pertama Sumber Daya Manusia (1 Orang)
 - Pranata Komputer Terampil (1 Orang)
 - Pengadministrasi Perkantoran (1 Orang)
 - Pengelola Data dan Informasi (1 Orang)
 - Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan (1 Orang)
- g. Tim Kerja Keuangan terdiri dari:
 - a) Ketua Tim: Perencana Ahli Madya (1 Orang)
 - b) Anggota Tim:
 - Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (1 Orang)
 - Perencana Ahli Muda (1 Orang)
 - Pranata Keuangan APBN Terampil (2 Orang)

- Pengolah Data dan Informasi (2 Orang)
- Perencana Ahli Pertama (1 Orang)
- Staf Keuangan (1 Orang)

1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki SDM yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari. Pegawai pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga berjumlah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1
2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2
3	Perencana Ahli Madya	3
4	Perencana Ahli Muda	1
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	1
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	2
9	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
10	Perencana Ahli Pertama	2
11	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
12	Analisis Hukum Ahli Pertama	1
13	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
14	Pranata Komputer Terampil	2
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
16	Pelaksana Pengadministrasian Perkantoran	2
17	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	1
18	Pelaksana Pengolah Data dan Informasi	3

19	PPNPN	2
Total		30

1.4 Potensi Permasalahan

Lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada tahun 2024 terjadi perubahan pembentukan tim yang tidak lagi berdasarkan tingkat eselon atau struktural melainkan sistem kerja yang dikoordinir oleh ketua tim atau fungsional sehingga memerlukan adaptasi. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan alur koordinasi. Contohnya, keuangan terpisah dengan perencanaan sehingga terdapat perubahan pola koordinasi yang terpisah. Perubahan sistem kerja ini juga memerlukan penyesuaian terhadap koordinasi dan saling kolaborasi.

Selain itu, dikarenakan minimnya jumlah SDM pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga maka beberapa tim kerja memiliki anggota yang sama sehingga tidak adanya pola kerja *segregation of duties* yang bisa menimbulkan potensi *fraud*. Penempatan SDM pada tim terkadang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
Menyajikan penjelasan umum terkait latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi; kondisi SDM Aparatur, potensi permasalahan, dan sistematika pelaporan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan rencana strategis 2020-2024 dan pohon kinerja, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan postur anggaran.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan analisis efisiensi sumber daya.
4. BAB IV PENUTUP
Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 beserta kendala dan saran rekomendasinya untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditandatangani di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga. Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam perencanaan kinerja harus ada komponen-komponen untuk mendukung capaian kinerja, yaitu melalui:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

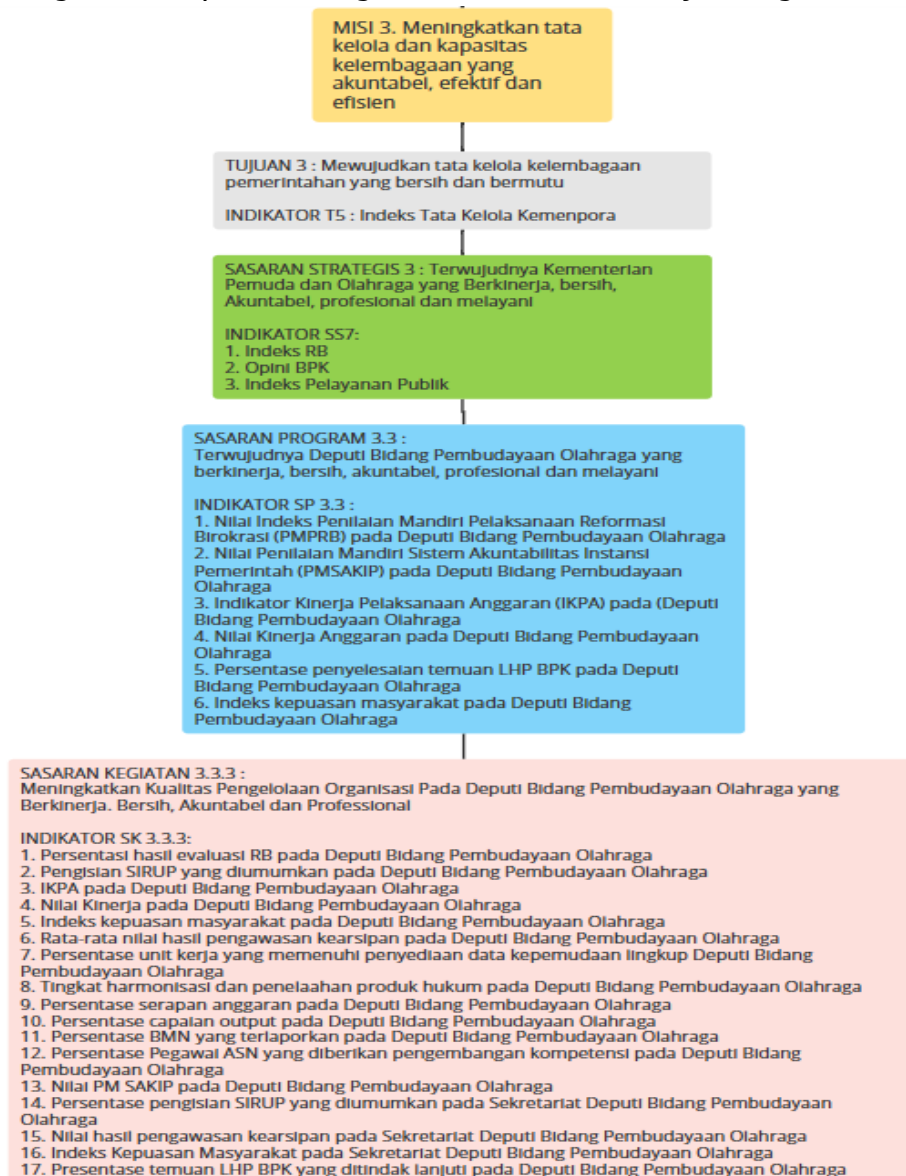
3. Kegiatan

kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

II.1 Rencana Strategis 2020-2024 dan Pohon Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2020-2024 merujuk pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI telah mengakomodasikan kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga secara khusus tentang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja bersih, akuntabel dan profesional. Dan untuk mewujudkan sasaran kegiatan tersebut memuat 16 indikator kinerja, Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga membuat Pohon Kinerja sebagai berikut:



II.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan serangkaian langkah intelektual yang dilakukan secara kolektif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian terkait kebijakan, kerangka pendanaan, kelembagaan, regulasi, serta evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana Kerja (Renja) berperan sebagai panduan pelaksanaan yang membantu menyelaraskan kegiatan sehari-hari dengan tujuan dan pencapaian organisasi.

Sebagai bentuk Rencana Kerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan 3 (tiga) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2024:

RO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal

Terdiri dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Protokol, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran.

RO 2 : Layanan Dukungan Manajemen Internal

Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Manajemen SDM.

RO 3 : Layanan Manajemen Kinerja Internal

Terdiri dari 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dirinci dalam *Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang dimuat dalam lampiran Laporan Kinerja ini.

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rentan waktu 2020-2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengalami perubahan SOTK sekali dan juga perubahan jabatan dari struktural menjadi jabatan fungsional, ini tentu mempengaruhi Indikator Kinerja Utama yang tersusun selama lima tahun. Dan pada Laporan Kinerja ini Indikator Kinerja Utama akan menampilkan sesuai SOTK baru yang tergambar dan menyesuaikan kegiatan yang tercantum dalam Rincian Kertas Kerja Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional .	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	84	85	86	87	75
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	87,5	88	89	90	91
		Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	84	86	88	90	92

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	66	67	68	72	75
		Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	96%	97%	98%	98%	99%
		Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92%	93%	94%	100%	100%
		Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	50%	50%	50%	50%	80%
		Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	69	70	70	70	80
		Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	N/A	N/A	80	85



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	N/A	N/A	87,5	90
		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	69%	70%	70%	70%	80%

II.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode waktu tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2024 dan diperbarui kembali pada September 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	75
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang	

berkinerja, akuntabel, dan profesional	Pembudayaan Olahraga	91
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92
	Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75
	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
	Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
	Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	99%
	Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
	Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%
	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%
	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90

II.5 Postur Anggaran

Pada tahun 2024, Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendanai layanan kesekretariatan selama tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode KRO	Keterangan	Pagu Anggaran (Rp)
1	EBA.957	Layanan Hukum	148.900.000
2	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	550.000.000
3	EBA.959	Layanan Protokoler	1.843.405.000
4	EBA.962	Layanan Umum	282.635.000
5	EBA.994	Layanan Perkantoran	738.360.000
6	EBC.957	Layanan Manajemen SDM	912.400.000
7	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	53.000.000
8	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	296.000.000
9	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	175.300.000
Total Pagu Anggaran			5.000.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh unit Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA
	Meningkatnya	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Data diperoleh berdasarkan inputan operator PPK yang diumumkan oleh KPA pada aplikasi LPSE. Pengukuran target kinerja pada indikator ini dengan cara anggaran/data yang diumumkan dibandingkan dengan anggaran/data keseluruhan dikali 100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^8 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot *$ Berdasarkan nilai IKPA yang diperoleh dari Menu Monev PA pada aplikasi OMSPAN di akhir tahun 2024 masing-masing SATKER. Terdapat 8 indikator yang dinilai yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan nilai kinerja yang ada pada aplikasi E-SMART yang ada pada masing-masing SATKER tahun 2024. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

			Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 5 indikator yang membentuk nilai kinerja tersebut yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi Rencana Penarikan Dana, Capaian Rincian Output, Efisiensi, dan Nilai Efisiensi. $NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CRO \times Wcro) + (NE \times We)$ NKI = Nilai Kinerja Anggaran aspek Implementasi P = penyerapan anggaran K = Konsistensi RPD CRO = Capaian Realisasi Output NE = Nilai Efisiensi Wp = Bobot penyerapan anggaran = 9,7% Wk = Bobot konsistensi RPD = 18,2% Wck = Bobot Capaian Keluaran = 43,5% We = Bobot efisiensi = 28,6%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan data Real Time per 31 Desember 2023 pada aplikasi eSKM. Terdapat 9 komponen penilaian yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana. Sembilan unsur tersebut dituangkan ke dalam 9 pertanyaan yang ada di kuesioner. Desain jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert.

		Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Data diperoleh dari Biro Humas dan Umum berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang sudah di review oleh ANRI. Data capaian akan dihitung berdasarkan nilai rata-rata Unit Kerja Eselon II yang sudah terverifikasi.
		Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Unit kerja yang memenuhi kebutuhan data sesuai dengan klasifikasi dibandingkan dengan unit kerja keseluruhan dikali 100%. Yang dimaksud dengan klasifikasi di sini adalah bergantung pada kebutuhan data Kedeputian
		Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Definisi akan diambil berdasarkan lembar evaluasi RB baik pada aspek pemenuhan dan reform. Menilai berdasarkan LKE RB (Pokja deregulasi Kebijakan).
		Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Data didapatkan berdasarkan total realisasi anggaran (SP2D) dibanding dengan total pagu anggaran tahun 2024 dikali 100%
		Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rata-rata capaian output pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II. Capaian output pada Unit Kerja Eselon II diperoleh berdasarkan seluruh realisasi indikator dibandingkan target dikali 100%.
		Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Jumlah laporan BMN yang disusun dan dilaporkan dibandingkan dengan keseluruhan laporan yang disusun selama 1 tahun dikali 100%.
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/ pengembangan SDM dibandingkan dengan seluruh pegawai pada kedeputian dikali 100%.

		Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada Satuan Kerja oleh Inspektorat Kemenpora (berdasarkan reuiu pada LKJ tahun sebelumnya). Nilai yang dipergunakan pada indikator ini adalah nilai yang terdapat pada berita acara. Nilai yang digunakan adalah data tahun sebelumnya yang merupakan jumlah nilai rata-rata dari seluruh unit kerja pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berdasarkan jumlah rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan dari tahun 2019 pada masing-masing satuan kerja. Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing satuan kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui Nota Dinas kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
		Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Data diperoleh berdasarkan inputan operator PPK yang diumumkan oleh PPK pada aplikasi LPSE. Pengukuran target kinerja pada indikator ini dengan cara anggaran/data yang diumumkan dibandingkan dengan anggaran/data keseluruhan x 100%.
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Data diperoleh dari Biro Humas dan Umum berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang sudah di review dan terverifikasi oleh ANRI pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi	Berdasarkan data Real Time per 31 Desember 2024 pada aplikasi eSKM. Terdapat 9 komponen

		Bidang Pembudayaan Olahraga	penilaian yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana. Sembilan unsur tersebut dituangkan ke dalam 9 pertanyaan yang ada di kuesioner. Desain jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert.
--	--	-----------------------------	---

III.2 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya.

Dalam mengukur kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output dan outcome, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator masukan berupa dana, sedangkan indikator keluaran dan hasil meliputi jumlah orang, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya.

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcome).
2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian

kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bag perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Sebagai salah satu elemen terpenting dalam penerapan Laporan Kinerja, tahapan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja keberhasilan (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah tabel pengukuran kriteria ketercapaian target indikator:

Rentang Capaian (%)	Kategori Capaian	Keterangan
Capaian $\geq$ 90	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
70 < Capaian $\leq$ 90	Baik	
50 < Capaian $\leq$ 70	Cukup	
Capaian $\leq$ 50	Kurang	

Berdasarkan perjanjian kinerja organisasi di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024, maka hasil capaian kinerja Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	75	83,45	112,67%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy	91	76,48	84%

		Bidang Pembudayaan Olahraga			
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	89,10	96,85%
		Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75	78,31	104,41%
		Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	99%	99,31%	100,31%
		Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	93,99%	93,99%
		Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	80%	100%
		Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	76,32	95,40%



	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	81,80%	102,25%
	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	100%	100%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85	76,17	89,61%
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90	89,83	99,81%

Secara umum capaian indikator kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah 98,70% atau berkategori Sangat Baik.

Indikator Kinerja pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mengalami perubahan yang masif pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena untuk lebih mendetailkan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 yang mana Indikator Kinerja pada masing-masing sekretariat pada level ke deputian di Kementerian Pemuda dan Olahraga menginduk pada Indikator Program Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

III.3 Capaian Analisis Kinerja

1. Persentase Pengisian SiRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengisian SiRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	N/A	N/A	100%	100%	100%

Pengisian SiRUP merupakan salah satu Indikator Kinerja terbaru di tahun 2024 pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. SiRUP adalah aplikasi sistem informasi

umum pengadaan berbasis Web (Web Based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUPnya. Pada setiap unit eselon I dan II diwajibkan untuk melakukan pelaporan pada aplikasi SiRUP sekaligus mengumumkannya pada website tersebut. Indikator Kinerja ini merujuk pada ketaatan unit Eselon I melakukan pengisian rencana, update data pagu anggaran, dan pengumuman pengadaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh unit selama tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024, seluruh unit teknis dan kedeputian telah melaksanakan pengisian rencana, update data, dan mengumumkan pengadaan atas kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.

Persentase pagu yang terumumkan pada SiRUP Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga per tanggal 31 Maret 2024 adalah 100%. Anggaran DIPA awal Tahun Anggaran 2024 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga adalah sebesar Rp122.626.232.0000, terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp5.000.000.000 dan Program Keolahragaan sebesar Rp117.626.232.000.

 Rekap RUP Cari Paket Kelola Data Unduh Moner FAQ Berita Dashboard Ketentuan Kontak Tampilkan 10 entri 2024 KPA_BID_PEMBUDAYAAN_OLAHRAGA									
No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	BIDANG KESEKRETARIATAN	577	161.969	61	26.795	10	3.120	648	191.886
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	553	49.639	224	9.272	0	0	777	58.911
3	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	498	56.435	26	36.452	21	4.550	545	97.438
4	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	266	34.298	301	34.738	24	1.625	591	70.663
5	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	119	31.118	303	1.538.787	1058	238.962	1480	1.808.868
6	BIDANG UNIT PELAYANAN TEKNIS	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Dekonsentrasi	5	797	12	1.312	0	0	17	2.109
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Dekonsentrasi	9	854	22	864	0	0	31	1.719
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Dekonsentrasi	15	977	32	714	0	0	47	1.692
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Dekonsentrasi	4	978	0	0	0	0	4	978

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	3820	Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas	17,467,842,000	11,406,050,000	11,406,050,000	0	100.00%	Dadi Surjadi, S.Pd, M.Si
2	3822	Pengembangan Olahraga Masyarakat	57,949,432,000	50,506,772,000	50,506,772,000	0	100.00%	Suyadi, S.IP
3	3821	Pengembangan Olahraga Pendidikan	42,208,958,000	42,208,958,000	42,208,958,000	0	100.00%	Moses Eleazar Ferdinandus, S.IAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	3,532,050,000	3,532,050,000	0	100.00%	Aris Subiyono, SH

Kendala dalam penyusunan RUP, selama Tahun Anggaran 2014, terjadi 12 kali revisi anggaran Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga. Seharusnya revisi tersebut harus diikuti dengan revisi pada SiRUP. Berikut adalah penyajian data SiRUP per 31 Desember 2024

Statistik Moner									
2024 KPA_BID_PEMBUDAYAAN_OLAHRAGA									

Program Dukungan Manajemen

Satuan Kerja : BIDANG PEMBUDAYA...
Kode Program : WA

2024 5,000,000,000

[Lihat semua Program](#)

Copy CSV Excel PDF Print

Cari:

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	3,532,050,000	3,532,050,000	0	100.00%	Aris Subiyono, SH

Statistik Moner									
2024 KPA_BID_PEMBUDAYAAN_OLAHRAGA									

Satuan Kerja : BIDANG PEMBUDAYA...
Kode Program : DA

2024 117,626,232,000

[Lihat semua Program](#)

Copy CSV Excel PDF Print

Cari:

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	3820	Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas	17,467,842,000	11,406,050,000	12,000,884,000	-594,834,000	105.22%	Dadi Surjadi, S.Pd, M.Si
2	3822	Pengembangan Olahraga Masyarakat	57,949,432,000	50,506,772,000	49,695,128,600	811,643,400	98.39%	Suyadi, S.IP
3	3821	Pengembangan Olahraga Pendidikan	42,208,958,000	42,208,958,000	32,210,276,000	9,998,682,000	76.31%	Moses Eleazar Ferdinandus, S.IAN

Penyajian data tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap penilaian paket yang sudah terumumkan di SiRUP pada LKPP dikarenakan penilaian yang digunakan adalah per 31 Maret tahun berjalan. Kendala tersebut pada pelaksanaan tahun-tahun berikutnya akan dilakukan monitoring pengupdatean data sesuai dengan revisi anggaran.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	84	85	86	87	75
	Realisasi	72,85	89,07	89,20	73,65	83,45

Terkelolanya anggaran yang optimal dan akuntabel diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator tersebut antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Dispen SPM merupakan pengurang dari nilai total IKPA tahun 2024.

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
Nilai	100.00	58.51	81.07	100.00	64.00	83.28	94.91	83.45	100%	0.00	83.45
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	8.78	16.21	10.00	6.40	8.33	23.73				
Nilai Aspek	79.26		82.09				94.91				

Berdasarkan capaian tersebut, penilaian kinerja tidak mencapai target secara maksimal dimana target nilai 88 namun sampai dengan 31 Desember 2024 hanya memperoleh nilai 83,40 dari target yang ditetapkan 88. Terdapat perbedaan target antara perjanjian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dengan perjanjian kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga di mana pada perjanjian kinerja Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melakukan revisi target nilai dari 88 ke 75. Hal ini terjadi karena adanya evaluasi secara internal terkait dengan kondisi ketercapaian IKPA pada bulan September tahun 2024 namun sayangnya perubahan tersebut tidak diakomodir pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Untuk nilai kinerja pada sasaran program ini sebesar 94,77%. Pencapaian target tidak dapat terpenuhi disebabkan oleh beberapa faktor. Pada gambar di atas bisa terlihat beberapa indikator yang dinilai rendah. Berikut adalah rincian faktor berdasarkan masing-masing indikator:

a. Deviasi Halaman III DIPA

- Adanya kesalahan dalam memperkirakan jumlah dana yang akan diambil setiap bulannya;

- Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana.
- b. Penyerapan Anggaran
 - Realisasi penyerapan anggaran berbeda jauh dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan target 15% pada Triwulan I, 50% pada Triwulan II/Semester I, 70% pada Triwulan III, dan 90% pada Triwulan IV/Semester II;
 - Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
 - Adanya pagu blokir.
- c. Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan
 - Keterlambatan pengumpulan dokumen dari pihak ke-3;
 - Keterlambatan penyusunan dokumen kontrak dan pendaftaran kontrak;
 - Keterlambatan pengajuan dokumen pengusulan pencairan untuk dikoreksi terlebih dahulu oleh PPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Pengelolaan UP dan TUP
 - Keterlambatan penyusunan dokumen pencairan;
 - Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan untuk dikoreksi terlebih dahulu oleh PPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Dispensasi SPM
 - Pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak kepada pergeseran waktu pencairan dana;
 - Adanya DIPA pembukaan blokir anggaran perjalanan dinas pada akhir periode anggaran sehingga pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah masa pengiriman SPM Non-LS selesai (18 Desember 2024).

Dari perincian atas permasalahan di atas maka akan dilakukan langkah untuk antisipasi dan peningkatan nilai IKPA pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Deviasi Halaman III DIPA
 - Peningkatan akurasi perkiraan penarikan dana yang akan diambil dengan lebih memperhatikan perkiraan jadwal pelaksanaan dan antisipasi atas perubahan jadwal tersebut.
- b. Penyerapan Anggaran
 - *Mapping* jadwal kegiatan dan antisipasi berubahnya jadwal kegiatan;
 - Melakukan percepatan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan dimulai sejak awal tahun;
 - Segera melengkapi kebutuhan data dukung untuk pengusulan pembukaan buka blokir di awal tahun 2024 sehingga kegiatan yang terblokir anggarannya bisa segera dilaksanakan
- c. Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan
 - Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk penyusunan kontrak dan pencairan pembayaran kontrak melalui SPP.
- d. Pengelolaan UP dan TUP

- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan.
- e. Dispensasi SPM
- Peningkatan komitmen pada masing-masing PPK dan BPP beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing UKE II untuk memperbaiki sistem kerja penyusunan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan;
 - Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan
 - Antisipasi kegiatan tidak dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran.

Penyusunan dan Penajaman Rencana Program dan Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-K/L 2024 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan juga menyusun rencana anggaran program satu tahun berjalan dan satu tahun kedepan, termasuk sasaran, output, daya serap anggaran.

Dalam layanan penyusunan dan penajaman rencana program dan anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga memiliki beberapa kegiatan diantaranya:

- Pelayanan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran untuk TA 2024 yang dilaksanakan secara hybrid meeting menghasilkan TOR dan RAB yang telah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program tahun 2024 yang mencapai realisasi 100% dengan bukti TOR dan RAB yang telah selesai disusun.
- Penelaahan Revisi yang dilakukan berkaitan dengan program/anggaran tahun 2024 yang telah mencapai Revisi DIPA 12 kali dan Revisi POK sebanyak 12 kali.

Penatausahaan Laporan Keuangan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Salah satu kewajiban pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran adalah melaporkan penggunaan anggaran pada satu tahun anggaran yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi. Penatausahaan laporan keuangan meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan untuk periode triwulanan. Laporan keuangan yang disusun diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, dapat dipahami, andal dan bertanggung jawab. Penyusunan laporan keuangan dilakukan pada setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Target yang diharapkan adalah 2 laporan yakni laporan satu semester dan laporan tahunan. Realisasi yang tercapai yakni 100%.

3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	87,5	88	89	90	91
	Realisasi	N/A	86,53	87,80	96,85	76,50

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (*proving*) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (*improving*) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker).

Nilai atas Kinerja Anggaran tersedia dan bisa diakses pada website E-SMART DJA. Nilai atas Kinerja Anggaran terdiri dari 2 komponen penilaian utama yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki 2 komponen penilaian, yaitu efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran. Efektivitas perencanaan anggaran merupakan nilai atas capaian rincian output sedangkan efisiensi perencanaan adalah nilai atas pelaksanaan dan efisiensi atas penggunaan SBK (Satuan Biaya Keluaran). Sedangkan untuk Nilai Pelaksanaan Anggaran didapatkan dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang ada pada website OM SPAN.

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
69,55	92,73	0,00	0,00

Pada tahun 2024, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 76,50 dari target sebesar 91. Perincian atas penilaian tersebut dirincikan pada gambar di bawah ini:

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
69,55	83,45	76,50

Kendala dalam Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah mayoritas jadwal kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi output menumpuk di akhir tahun. Hal ini terjadi karena adanya kendala pada bagian anggaran seperti masih adanya pagu blokir akibat kurangnya data dukung seperti TOR dan Juknis Kegiatan/Bantuan, pergantian pejabat pengelola keuangan, dan adanya jadwal kegiatan yang diundur/terhambat akibat perubahan program dan kebijakan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran adalah adanya pemotongan pagu untuk kepentingan menutup kekurangan Belanja Pegawai pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga akibat kenaikan tunjangan kinerja pegawai sehingga banyak sekali kegiatan yang dibatalkan seperti pelaksanaan festival olahraga dan penyerahan bantuan atau fasilitasi olahraga kepada masyarakat.

Selain karena pemotongan pagu, pada tanggal 9 November 2024 telah keluar Surat Edaran Menteri Keuangan terkait dengan kewajiban *self-blocking* akun perjalanan dinas tahun 2024 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan yang dibatalkan.

Tindak Lanjut atas Kendala Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran

Ujung tombak dari pelaksanaan kinerja anggaran adalah akurasi dan kematangan dalam perencanaan. Oleh karena itu, seluruh UKE II diharapkan bisa merencanakan, menjadwalkan, mengantisipasi pelaksanaan kegiatan dengan baik dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga memuat komponen penilaian atas penerapan SBK (Standar Biaya Keluaran) sehingga diharapkan UKE II bisa mengajukan penyusunan SBK untuk kegiatan yang berulang setiap tahun.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	84	86	88	90	92
	Realisasi	N/A	92,28	90,49	86,32	89,04

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode

Pelaksanaan SKM menggunakan aplikasi e-skm dan manual yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu :

Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/tarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu 10 bulan 12 hari. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2024
2.	Pengumpulan Data	Januari-November 2024
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2024
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2024

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan SKM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan data target sasaran program/kegiatan tahun 2024. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 41.890 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 1.261 orang hingga tanggal 12 November 2024.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Tabel 2. Tabel Krejcie and Morgan untuk menentukan Jumlah Sampel SKM

Adapun sebaran sampel tiap unit Eselon II pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang adalah sebagai berikut:

Unit	Populasi	Sampel	Responden	%
Sekretaris Deputy	240	148	163	6.18%
Asdep Olahraga Pendidikan	20.400	384	821	31.15%
Asdep Olahraga Masyarakat	16.750	375	1171	44.42%
Asdep Olahraga Disabilitas	4.500	354	481	18.25%
Total Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	41.890	1.261	2.636	10%

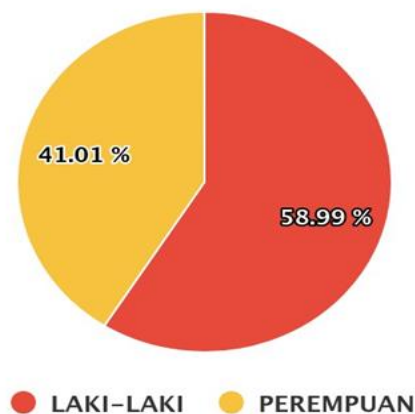
Tabel 3. Jumlah Responden SKM dan Persentasenya

Hasil Pelaksanaan SKM (Data Responden)

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 2636 orang responden, dengan rincian Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1555 responden (58.99%), sedangkan responden perempuan sebanyak 1081 orang (41.01%).

#	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	LAKI-LAKI	1555	58.99%
2	PEREMPUAN	1081	41.01%
Total		2636	100%

Tabel 4. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Jenis Kelamin

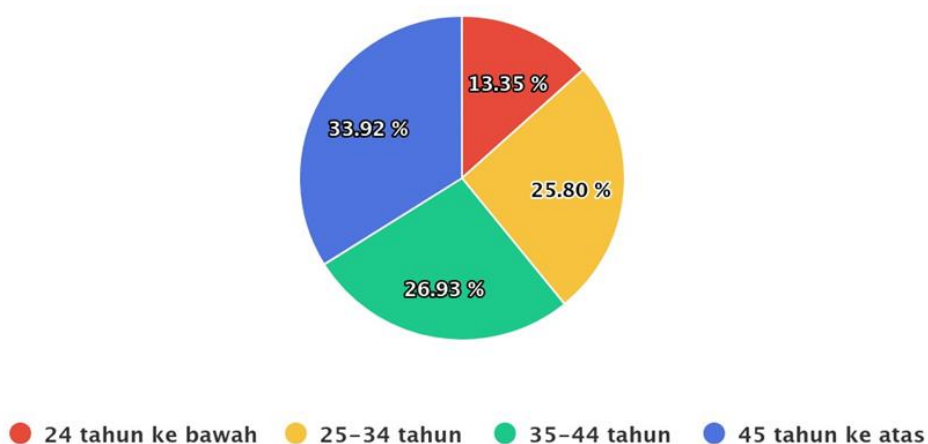


Gambar 1. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan usia, sebagian besar responden adalah berusia 45 tahun ke atas sebanyak 894 orang (33.92%), disusul dengan responden usia 35-44 tahun sebanyak 710 orang (26.93%), usia 25-34 tahun sebanyak 680 orang (25.8%) dan 24 tahun kebawah sebanyak 352 orang (13.35%)

#	Range Usia	Responden	Persentase
1	24 tahun ke bawah	352	13.35%
2	25-34 tahun	680	25.8%
3	35-44 tahun	710	26.93%
4	45 tahun ke atas	894	33.92%
Total		2636	100%

Tabel 5. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Usia



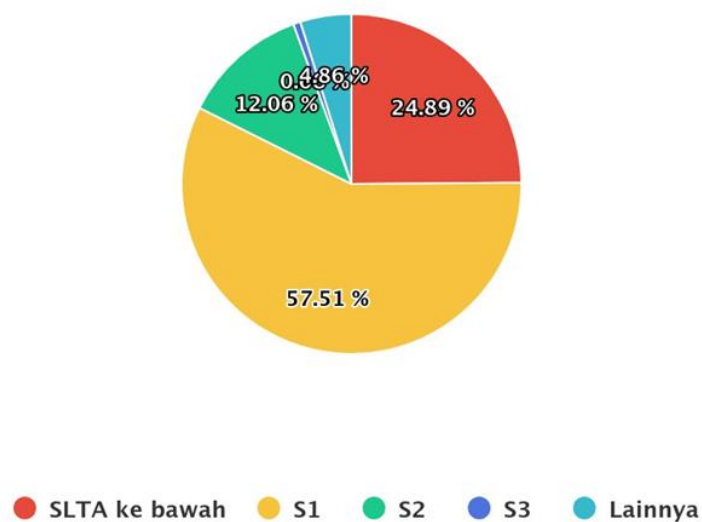
Gambar 2. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Usia

Berdasarkan range pendidikan, responden terbanyak berpendidikan terakhir S1 berjumlah 1516 orang (57.51%), selanjutnya adalah responden dengan pendidikan terakhir SLTA ke bawah sejumlah 656 orang (24.89%), S2 sebanyak 318 orang (12.06%), lainnya sebanyak 128 orang (4.86%) dan yang paling sedikit adalah S3 sebanyak 18 orang (0.68%).

Berdasarkan range pendidikan, responden terbanyak berpendidikan terakhir S1 berjumlah 1516 orang (57.51%), selanjutnya adalah responden dengan pendidikan terakhir SLTA ke bawah sejumlah 656 orang (24.89%), S2 sebanyak 318 orang (12.06%), lainnya sebanyak 128 orang (4.86%) dan yang paling sedikit adalah S3 sebanyak 18 orang (0.68%).

#	Range Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA ke bawah	656	24.89%
2	S1	1516	57.51%
3	S2	318	12.06%
4	S3	18	0.68%
5	Lainnya	128	4.86%
Total		2636	100%

Tabel 6. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Pendidikan

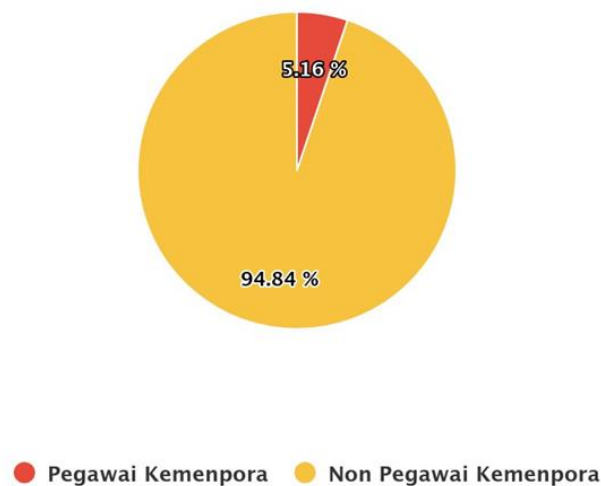


Gambar 3. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Range Pendidikan

Data menunjukkan sebagian besar responden adalah non pegawai Kemenpora sebesar 94.84% dan pegawai Kemenpora 5.16%.

#	kategori Responden	Responden	Persentase
1	Pegawai Kemenpora	136	5.16%
2	Non Pegawai Kemenpora	2500	94.84%
Total		2636	100%

Tabel 7. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Kategori Asal Organisasi

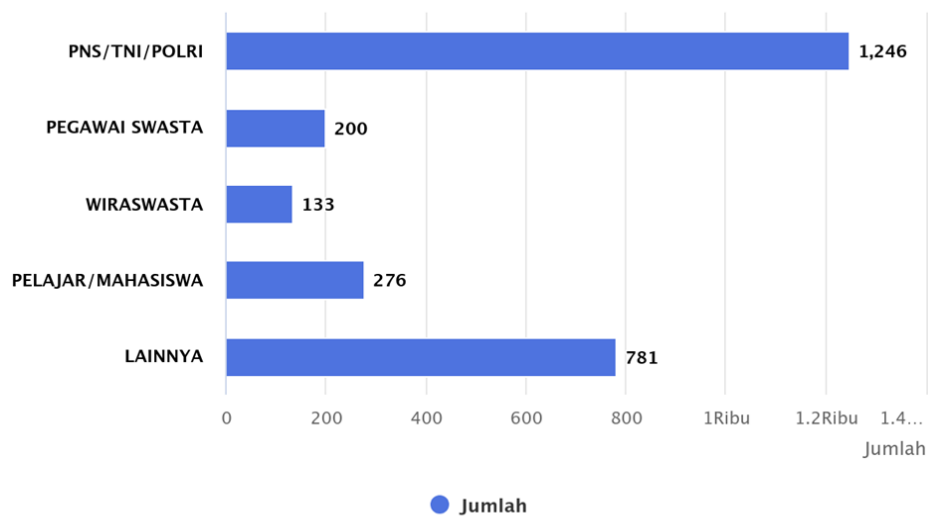


Gambar 4. Grafik Sebaran Responden SKM Berdasarkan Kategori Asal Organisasi

Berdasarkan pekerjaan, data hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (47.27%) berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI, disusul kategori lainnya (29.63%), pelajar/mahasiswa (10.47%), pegawai swasta (7.59%), dan wiraswasta (5.05%).

#	Pekerjaan	Responden	Persentase
1	PNS/TNI/POLRI	1246	47.27%
2	PEGAWAI SWASTA	200	7.59%
3	WIRASWASTA	133	5.05%
4	PELAJAR/MAHASISWA	276	10.47%
5	LAINNYA	781	29.63%
Total		2636	100%

Tabel 8. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Pekerjaan



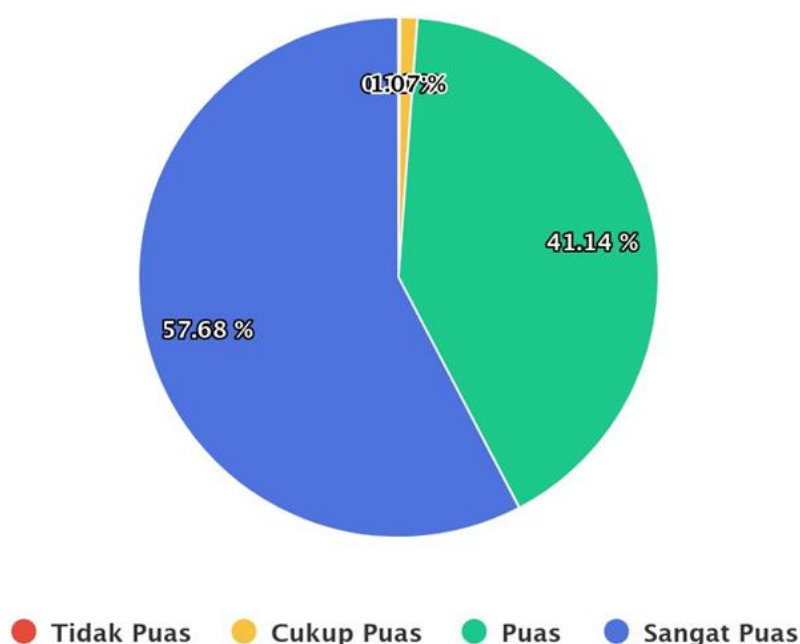
Gambar 5. Sebaran Responden SKM Berdasarkan Pekerjaan

Data nilai IKM tiap unsur adalah sebagai berikut:

#	Unsur SKM	Nilai IKM	Nilai IKM (DiKonversi)	Mutu	Kinerja
1	Persyaratan	3.48	86.99	B	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.47	86.64	B	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3.41	85.35	B	Baik
4	Biaya/Tarif	3.75	93.84	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3.46	86.49	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.54	88.4	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.58	89.56	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	3.88	97.07	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3.5	87.57	B	Baik

Tabel 8. Nilai IKM tiap Unsur

Persentase Jumlah Responden Secara Umum



Gambar 7. Grafik Nilai IKM Berdasarkan Jumlah Respon

Kendala dalam SKM pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah Tidak semua responden terbiasa mengisi formulir secara online sehingga ada responden yang lebih mudah mengisi dengan form manual, Beberapa kali terjadi gangguan (error) dalam aplikasi e-skm, Adanya responden yang kurang memahami pertanyaan dalam kuesioner sehingga harus dijelaskan lebih detail oleh petugas, dan Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.41 Selanjutnya produk, spesifikasi dan jenis layanan

mendapatkan nilai 3.46 adalah nilai terendah kedua. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan menjadi unsur terendah ketiga dengan nilai 3.47.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan dinilai baik, yang juga berarti masih dirasakan kurang cepat oleh penerima layanan (bukan sangat baik).
- Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan dinilai sesuai (belum sangat sesuai) dengan harapan responden.

Tindak Lanjut atas Kendala SKM pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Evaluasi dengan melihat hasil IKM dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

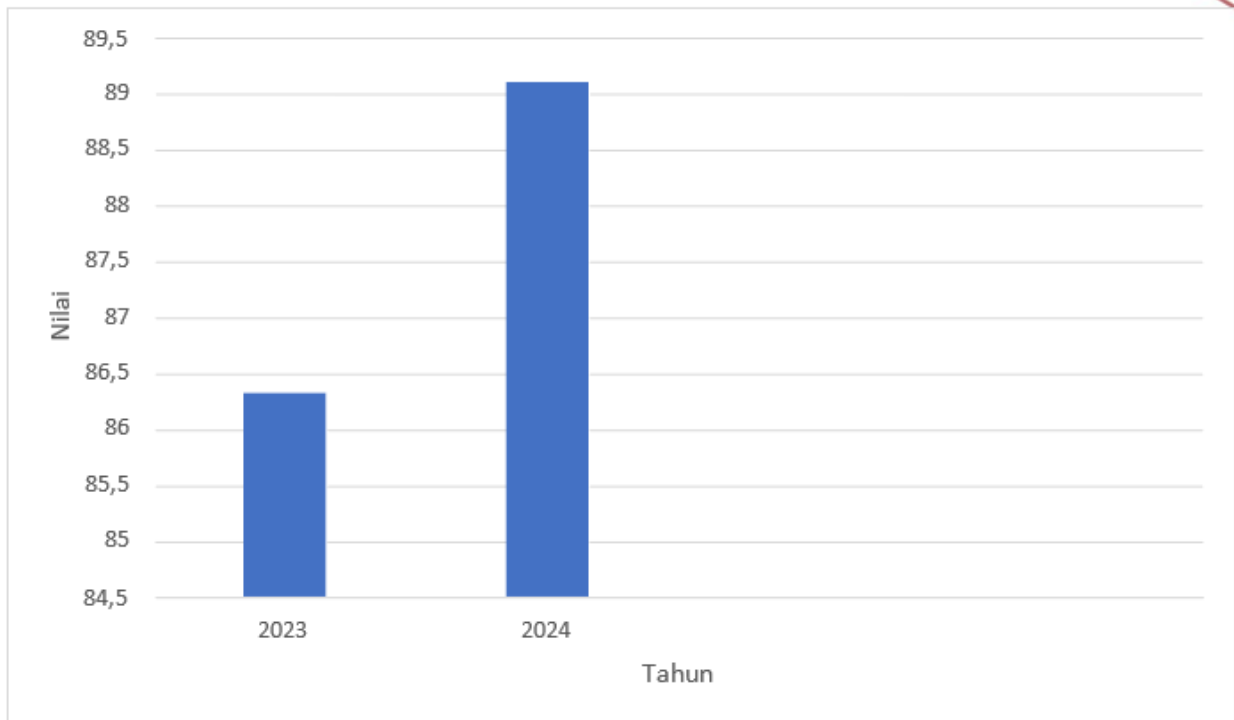
Tim yang bertanggung jawab terhadap SKM menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan selama 12 bulan (satu tahun ke depan).

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Memberikan masukan kepada unit-unit pelaksana untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan	√				Tim Humas
		Melakukan monitoring dan evaluasi agar unit-unit pelaksana tepat waktu dalam memberikan pelayanan/ melaksanakan kegiatan		√	√	√	Unit Eselon II terkait
2	Produk, spesifikasi dan jenis layanan yang diberikan	Mendata ketersediaan dan kecocokan Standar Pelayanan dan SOP dengan jenis Pelayanan yang diberikan	√				Tim SDM dan Organisasi
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur dan Layanan	Melakukan review dan penyusunan SP dan SOP Pelayanan	√				Tim SDM dan Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi Pemberian layanan sesuai SP dan SOP		√	√	√	Tim SDM dan Organisasi

Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang

SANGAT BAIK dengan nilai SKM 89,1. Nilai SKM ini menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya (2023).



Gambar 8. Grafik Nilai IKM tahun 2023 dan 2024

5. Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	66	67	68	72	75
	Realisasi	N/A	57,58	64,86	72,12	78,31

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan pada unit eselon II ini diawasi oleh bagian Kearsipan di Biro Humas dan Umum. Nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi kearsipan yang disampaikan oleh ANRI pada Desember 2024 di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Arsip Dinamis 50 % Terdiri dari penilaian:

1. Penciptaan Arsip 25%
2. Penggunaan Arsip 25%

3. Pemeliharaan Arsip 25%

4. Penyusutan Arsip 25%

Sumber Daya Kearsipan 50% Terdiri dari penilaian:

1. SDM Kearsipan 25%

2. Prasarana dan Sarana Kearsipan 25%

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan sebesar 78,31 dengan target 75. Berikut adalah rincian atas nilai hasil pengawasan kearsipan pada masing-masing UKE II di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga:

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TERVERIFIKASI TAHUN 2024 DAN PERBANDINGAN TAHUN 2023**

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI USULAN 2024	NILAI VERIFIKASI 2024	NILAI VERIFIKASI 2023
IV	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga			
16	Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga	88,85	76,17	85,08
17	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	87,34	87,34	81,04
18	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	87,60	87,60	74,75
19	Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas	62,13	62,13	47,59

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai dari hasil pengawasan kearsipan di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sangat bervariasi. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat mendapatkan nilai tertinggi yaitu 87,60 sedangkan nilai terendah dipegang oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas yaitu 62,13. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah mencapai target nilai yang ditetapkan di awal tahun dan mengalami peningkatan nilai dari tahun 2023 sebesar 72,12 dan tahun 2024 sebesar 78,31, melalui Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan di bidang administrasi kearsipan dan keutuhan arsip.

Kendala dalam Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah tidak ada Surat Pengajuan untuk penyusutan arsip tahun 2024, tidak ada Berita Acara Penyusutan Arsip tahun 2024, tidak ada Dokumentasi Penyusutan Arsip tahun 2024, tidak ada Sertifikat Pengelola Arsip, tidak ada daftar data penyusutan arsip tahun 2024, tidak ada Sertifikat Arsiparis, tidak ada Arsip Aktif pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selama tahun 2023 sampai 2024, minimnya sarana dan prasarana kearsipan dikarenakan ruangan yang terbatas, pemeliharaan arsip yang masih belum terorganisir dengan baik, dan juga terkait dengan penyusutan arsip yang belum dikelola dengan baik.

Tindak Lanjut atas Kendala Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Evaluasi dengan melihat hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga akan memperbaiki hambatan yang mempengaruhi nilai arsip terutama dalam SDM arsiparis karena bobot penilaian paling besar.

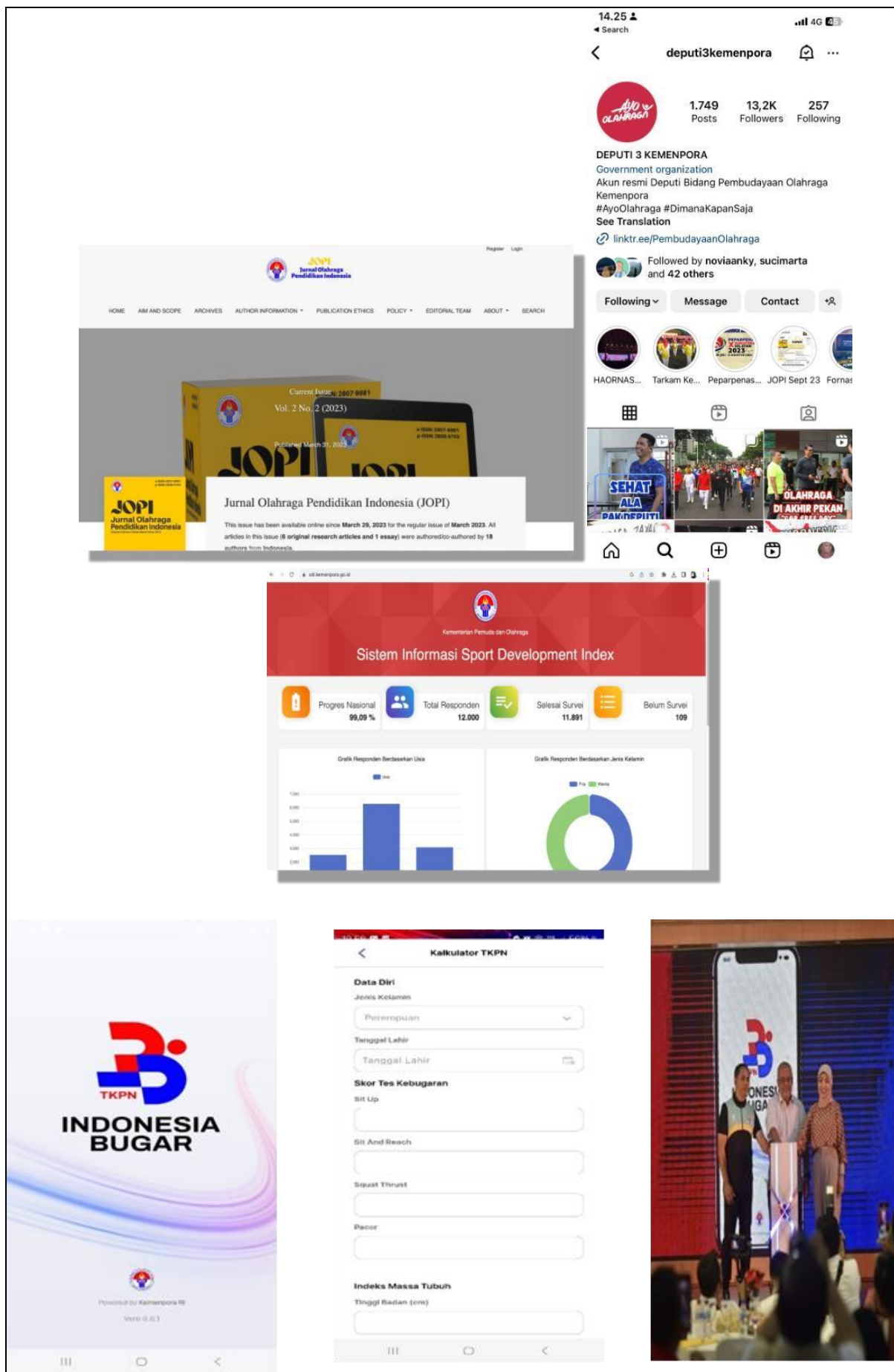
6. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	N/A	N/A	100%	100%	100%

Pada Penyediaan berbagai informasi data keolahragaan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dapat dilihat melalui website Deputy 3 Pembudayaan Olahraga dan Indonesia Berolahraga. Pada website Deputy 3 Pembudayaan Olahraga semua informasi atau berita terkait Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dapat diakses masyarakat mulai dari kegiatan internal kedeputian sampai kegiatan pembudayaan olahraga skala nasional. Sedangkan Indonesia Berolahraga adalah sebuah website yang menyediakan informasi program/kegiatan pembudayaan olahraga di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga atau Stakeholder Bidang Pembudayaan Olahraga. Target penyediaan data sudah tercapai 100% dimana semua unit kerja sudah menginput data program kegiatan unggulan di masing-masing unit kerja. Selain adanya website Indonesia berolahraga, masing-masing unit kerja juga memiliki aplikasi penyediaan data seperti Asdep Olahraga Pendidikan dengan aplikasi JOPI dan TKPN. Asdep Olahraga Masyarakat memiliki aplikasi SISDI yang digunakan untuk pengambilan data penghitungan IPO (Indeks Pembangunan Olahraga). Semua aplikasi penyediaan data di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dalam pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Sekretariat Deputy Bidang pembudayaan Olahraga. Pengumpulan data pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tidak ada kendala dalam berbagai aspek hanya saja disarankan adanya google drive yang berisi integrasi data pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga supaya dalam pencarian data mudah untuk didapatkan tetapi apabila data tersebut rahasia bisa dibuat akses terbatas.

Penyediaan Data di Lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga





7. Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	N/A	N/A	100%	100%	100%

Pada Kegiatan layanan hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai target, dimulai dari penelaahan produk hukum, penyusunan juknis dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Penelaahan produk hukum tahun 2024 pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari:

1. Penguatan Substansi RPP dan Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga.
2. Penelaahan terhadap rekomendasi atas pelaksanaan kejuaraan olahraga yang diajukan oleh *stakeholder* termasuk pencantuman logo dan tanda tangan atas sertifikat kejuaraan.

Petunjuk Teknis yang dihasilkan tahun 2024 pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga:

1. Juknis Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan Tahun 2024;
2. Juknis Bantuan dalam Bentuk Uang Olahraga Masyarakat dan Olahraga Pendidikan Tahun 2024;
3. Juknis pelaksanaan kegiatan dan festival keolahragaan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tidak ada kendala dalam berbagai aspek tetapi terdapat beberapa saran agar lebih baik lagi yaitu publikasi dan sosialisasi terkait produk hukum yang sudah dibuat kepada pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga serta apabila ada beberapa prosedur dalam meningkatkan pelayanan publik dapat membuat standar operasional prosedur.

8. Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang	Target	96%	97%	98%	98%	99%

Pembudayaan Olahraga	Realisasi	97,39%	98,62%	98,07%	99,06%	99,31%
----------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
	JUMLAH KESELURUHAN	115,529,232,000	114,735,414,491	99,31%
	Program Keolahragaan			
1	Olahraga Penyandang Disabilitas	16,770,842,000	16,619,918,748	99.10
2	Olahraga Pendidikan	39,044,658,000	38,830,575,390	99.45
3	Olahraga Masyarakat	54,713,732,000	54,290,884,270	99.23
	Program Dukungan Manajemen			
1	Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	4,994,036,083	99.88

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, anggaran yang terserap sebesar Rp114.735.414.491 atau 99,31%. Serapan anggaran Deputi Pembudayaan Olahraga pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023. Pagu Rp115.529.232.000 merupakan pagu sesudah pemotongan Rp5.000.000.000 yang digunakan untuk tunjangan kinerja dan Rp2.097.000.000 berupa pagu blokir atas penghematan perjalanan dinas berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 314/PB/2024 tanggal 7 November 2024. Walaupun terdapat pagu blokir atas akun perjalanan dinas di tahun 2024, UKE II masih bisa melaksanakan dengan maksimal.

9. Nilai Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%

	Realisasi	100%	100%	120%	129,80%	93,99%
--	-----------	------	------	------	---------	--------

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Pada tahun 2024, UKE II di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan realisasi capaian output keseluruhan sebesar 93,99% dengan target 100%. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya pemotongan pagu untuk kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pagu blokir atas akun perjalanan dinas di akhir tahun 2024. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh UKE II. Selain itu UKE II juga masih tetap berusaha dan berinovasi untuk melakukan kegiatan walaupun kondisi pagu kegiatan sudah berkurang. Berikut adalah rincian realisasi capaian output untuk Program Prioritas Nasional yang ada di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Program Prioritas Nasional yang tidak tercapai merupakan *domino effect* atas pemotongan pagu dan *self-blocking*.

No	Rincian Output	Target	Realisasi	%
Asisten Deputi Bidang Olahraga Disabilitas				
1	Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi	4.500 Orang	6.024 Orang	133,87%
Asisten Deputi Bidang Olahraga Pendidikan				
1	Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional	104 Lembaga	59 Lembaga	56,73%

2	Peserta kampanye olahraga olimpiak di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	170.000 Orang	150.220 Orang	88,36%
3	Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi	2.174 Orang	2.208 Orang	101,56%
4	Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan	2 Lembaga	1 Lembaga	50%
5	Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	185 Lembaga	89 Lembaga	48,10%

Asisten Deputi Bidang Olahraga Masyarakat

1	Rancangan Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan yang Tersusun dan Termanfaatkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata	20 Lembaga	20 Lembaga	100%
3	Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi	10.500 Orang	11.960 Orang	113,90%
4	Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri dan Promosi Olahraga	500 Orang	563 Orang	112,60%
5	Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Rekreasi	4 Lembaga	3 Lembaga	75%
6	Lembaga yang difasilitasi Sarana dan Olahraga Rekreasi	245 Lembaga	245 Lembaga	100%

Pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa Program Prioritas Nasional telah tercapai sebesar 90%. Sedangkan untuk perincian atas realisasi capaian output secara keseluruhan atas kegiatan lain dapat dilihat pada Lampiran.

10. Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Barang Milik Negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan barang milik negara instansi pemerintah termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya pada satker Pengembangan Pemuda diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara per semester yang didalamnya mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Nilai persentase BMN yang terlaporkan mencapai target 100% karena pelaporan BMN pada Satker Bidang Pembudayaan Olahraga dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan.

Salah satu kewajiban pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran adalah melaporkan penggunaan anggaran pada satu periode atau satu tahun anggaran yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi. Penatausahaan laporan keuangan meliputi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dalam hal penilaian kinerja pemerintahan salah satu unsur berhasil atau tidaknya suatu organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengelola, mencatat, memanfaatkan barang milik Negara yang menjadi bagian dari organisasi dimaksud.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan barang milik Negara dapat dilihat pada Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan: "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah".

Sedangkan pengertian barang menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah setiap benda baik yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.

11. Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	50%	50%	50%	50%	80%
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, maka dilaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang peningkatan kualitas SDM. Setiap tahun diadakan pelatihan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Pada tahun 2024 ini Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan kegiatan:

1. Tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 di Bandung, Pengembangan kapasitas dan karakter pegawai
2. Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2024 di Jakarta, Pelatihan penulisan berita
3. Tanggal 6 Juni 2024 di Jakarta, Pelatihan fotografi
4. Tanggal 30 Oktober 2024 di Jakarta, sosialisasi jabatan fungsional analis kebijakan dan analis perencanaan

Dalam pelaksanaan kompetensi Pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, tidak ada hambatan hanya saja diperlukan lebih banyak pengembangan pegawai seperti pelatihan *public speaking*, TOEFL, cara analisis data dengan baik dan benar, dan yang lainnya.

Foto Pengembangan SDM





Soreang: Pembukaan kegiatan Pengembangan SDM di Lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dilaksanakan pada 1-3 Maret 2024. Kegiatan dibuka langsung oleh Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Rudy Sufahriadi (Dok: yn)

Foto Pelatihan Penulisan Berita dan Fotografi Kehumasan

Jakarta: Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga menggelar pelatihan kehumasan penulisan berita dan fotografi di Hotel Blue Sky, Jakarta. Kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas publikasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga ini akan berlangsung pada 5-6 Juni 2024.

Rabu, 05 Jun 2024

BAGIKAN : [f](#) [t](#) [w](#)



Jakarta: Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga menggelar pelatihan kehumasan penulisan berita dan fotografi di Hotel Blue Sky, Jakarta. Kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas publikasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga ini akan berlangsung pada 5-6 Juni 2024.

Pelatihan ini diikuti oleh staf yang ada di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan yang terdiri dari tiga orang perwakilan dari masing-masing unit keasdepan dan staf pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

Target persentase pegawai yang memperoleh pengembangan sdm sebanyak 80%, dan yang mengikuti peningkatan kompetensi pegawai lebih dari 100% jumlah pegawai di lingkungan Deputy Pembudayaan Olahraga, jadi realisasi 100%.

12. Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	69	70	70	70	80
	Realisasi	65,53	67,62	67,41	77,06	76,23

Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan Amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan

instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansi secara berkelanjutan. Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa kategori penilaian tersebut, SAKIP Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebesar 76,23. Dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

Kendala dalam Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala utama yang menjadi penghambat atas ketercapaian nilai SAKIP adalah terkait dengan Pelaporan Kinerja dimana Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga hanya mendapatkan poin sebesar 7,92 dari poin maksimal sebesar 15. Hal ini terjadi karena penyusunan atas dokumen pelaporan kinerja masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyesuaian atas strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya penyusunan Laporan Kinerja pada setiap triwulannya agar bisa menjelaskan dan menganalisis secara lebih *real time* terkait dengan proses pencapaian target kinerja pada tahun berjalan sehingga apabila ditemukan suatu hambatan bisa dievaluasi dan diatasi lebih dini. Laporan Kinerja hanya digunakan sebagai 'tradisi tahunan' untuk menggugurkan kewajiban tanpa dimengerti lebih dalam terkait kebermanfaatannya.

Laporan Kinerja juga masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan atas rencana kerja dan targetnya. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga masih mendapatkan nilai B pada bagian penetapan target yang memenuhi kriteria SMART, *achievable*, dan menantang. Hal ini akan menjadi catatan dan tantangan tersendiri untuk masing-masing UKE II dalam hal perencanaan kinerja. Pelaporan Kinerja, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga juga mendapatkan poin yang rendah pada Perencanaan Kinerja. Dari poin maksimal sebesar 30 poin, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga hanya mendapatkan angka 23,38 poin. Nilai tersebut tergolong rendah dikarenakan beberapa dokumen perencanaan kinerja masih belum dilakukan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Proses perencanaan kinerja juga masih ada beberapa step yang tidak dilakukan secara maksimal yaitu *cascading* kinerja dari atasan ke staf termasuk dengan target atas indikator kinerja yang masih belum terstruktur dengan baik nomenklatur dan pagu anggarannya. Terdapat juga beberapa dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja yang belum dipublikasikan tepat waktu.

Tindak Lanjut atas Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Atas rekomendasi AKIP tahun 2022, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1	Agar dokumen renstra di reviu secara berkala	Akan dilakukan kembali reviu secara berkala membandingkan renstra kementerian dengan renstra deputy
2	Agar dokumen renstra memuat target tahunan	Belum semua indikator memuat target tahunan
3	Agar rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala	Belum semua rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala
4	Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	Pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment
5	Agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala baik bulanan/triwulan/semester
6	Agar laporan kinerja sepenuhnya menyajikan informasi analisis efisiensi sumber daya	Analisis efisiensi sumber daya belum dibuat per indikator
7	Agar dapat dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi	Evaluasi atas rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Dalam rangka terselenggaranya *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka kelancaran tugas-tugas, peningkatan kualitas kinerja, serta pencegahan kendala-kendala yang mungkin terjadi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga diperlukan suatu pengawasan serta evaluasi untuk peningkatan kualitas program di masa yang akan datang, serta melaksanakan salah satu program pembangunan yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan

Pemantapan pelaksanaan program pengembangan di bidang Pembudayaan Olahraga. Penyusunan laporan kinerja ada dua kegiatan yaitu LKj Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dan LKj Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2.

13. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	70%	70%	70%	70%	80%
	Realisasi	100%	50%	100%	100%	81,8%

Pada Tahun Anggaran 2020-2022 terdapat 11 rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Adapun rekomendasi yang disarankan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terdapat pada lampiran Laporan Kinerja ini. Selama tahun 2020-2022, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah menindaklanjuti 9 dari 11 rekomendasi BPK. Adapun rekomendasi BPK adalah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku KPA mengintruksikan kepada para PPK agar melakukan pengujian pertanggungjawaban atas belanja Perjalanan Dinas dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. Tindaklanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada teguran dari KPA Satker Bidang Pembudayaan Olahraga kepada PPK dikarenakan perubahan SOTK yang terjadi di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang disertai perubahan pejabat keuangan, dalam hal ini KPA dan PPK. Agar temuan pemeriksaan tidak berulang lagi, maka:

1. KPA akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pertanggungjawaban belanja;
2. PPSPM, PPK, BP, dan BPP agar mempedomani ketentuan yang berlaku dan lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban belanja.

Pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFhvxLbihazO_a6MmuNQQIWqFk5iqRiAZ8V0904y5C8/edit?usp=sharing

14. Persentase pengisian SiRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengisian SiRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	N/A	N/A	100%	100%	100%

Program Dukungan Manajemen

Satuan Kerja : BIDANG PEMBUDAYA...

Kode Program : WA

2024 5,000,000,000

[Lihat semua Program](#)

Copy
CSV
Excel
PDF
Print

Cari:

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	3,532,050,000	3,532,050,000	0	100.00%	Aris Subiyono, SH

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	BIDANG KESEKRETARIATAN	577	161.969	61	26.795	10	3.120	648	191.886
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	553	49.639	224	9.272	0	0	777	58.911
3	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	498	56.435	26	36.452	21	4.550	545	97.438
4	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	266	34.298	301	34.738	24	1.625	591	70.663
5	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	119	31.118	303	1.538.787	1058	238.962	1480	1.808.868
6	BIDANG UNIT PELAYANAN TEKNIS	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Dekonsentrasi	5	797	12	1.312	0	0	17	2.109
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Dekonsentrasi	9	854	22	864	0	0	31	1.719
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi Dekonsentrasi	15	977	32	714	0	0	47	1.692
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Dekonsentrasi	4	978	0	0	0	0	4	978

Statistik Moner

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	5,000,000,000	3,532,050,000	3,532,050,000	0	100.00%	Aris Subiyono, SH

Statistik Moner

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase	Nama PPK
1	3820	Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas	17,467,842,000	11,406,050,000	11,406,050,000	0	100.00%	Dadi Surjadi, S.Pd, M.Si
2	3822	Pengembangan Olahraga Masyarakat	57,949,432,000	50,506,772,000	50,506,772,000	0	100.00%	Suyadi, S.IP
3	3821	Pengembangan Olahraga Pendidikan	42,208,958,000	42,208,958,000	42,208,958,000	0	100.00%	Moses Eleazar Ferdinandus, S.IAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi ketika pengisian SiRUP adalah revisi anggaran yang terjadi berkali-kali sehingga menyebabkan data pada aplikasi SiRUP juga harus direvisi dan diumumkan kembali. Untuk menjaga nilai capaian SiRUP tetap pada 100% Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan melakukan penginputan RUP sebelum tanggal 31 Maret 2024.

15. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	N/A	N/A	N/A	80	85
	Realisasi	N/A	65,28	75,25	85,08	76,17

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan pada unit eselon II ini diawasi oleh bagian Kearsipan di Biro Humas dan Umum. Nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi kearsipan yang disampaikan oleh ANRI pada Desember 2024 di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Arsip Dinamis 50% Terdiri dari penilaian:

1. Penciptaan Arsip 25%
2. Penggunaan Arsip 25%
3. Pemeliharaan Arsip 25%
4. Penyusutan Arsip 25%
5. Sumber Daya Kearsipan 50%

Terdiri dari penilaian:

1. SDM Kearsipan 25%
2. Prasarana dan Sarana Kearsipan 25%

Pada tahun 2024, Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 76,17 dengan target 85. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya SDM yang mengurus kearsipan dan penyusutan arsip yang belum dikelola dengan baik. Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan arsip terutama terkait dengan penyusutan arsip.

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TERVERIFIKASI TAHUN 2024 DAN PERBANDINGAN TAHUN 2023**

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI USULAN 2024	NILAI VERIFIKASI 2024	NILAI VERIFIKASI 2023
IV	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga			
16	Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga	88,85	76,17	85,08
17	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	87,34	87,34	81,04
18	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	87,60	87,60	74,75
19	Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas	62,13	62,13	47,59

Kendala Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Kendala yang dihadapi untuk Pencapaian Kinerja selama tahun 2024 adalah tidak ada Surat Pengajuan untuk penyusutan arsip tahun 2024, tidak ada Berita Acara Penyusutan Arsip tahun 2024, tidak ada Dokumentasi Penyusutan Arsip tahun 2024, tidak Ada Sertifikat Pengelola Arsip, tidak ada daftar data penyusutan arsip tahun 2024, tidak ada Sertifikat Arsiparis, tidak ada Arsip Aktif pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selama tahun 2023 sampai 2024, minimnya sarana dan prasarana kearsipan dikarenakan ruangan yang terbatas, pemeliharaan arsip yang masih belum terorganisir dengan baik, dan juga terkait dengan penyusutan arsip yang belum dikelola dengan baik.

Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Evaluasi dengan melihat hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan memperbaiki hambatan yang mempengaruhi nilai arsip terutama dalam SDM arsiparis karena bobot penilaian paling besar.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Target	N/A	N/A	N/A	87,5	90
	Realisasi	N/A	98.85	87,35	88,25	89,83

Tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

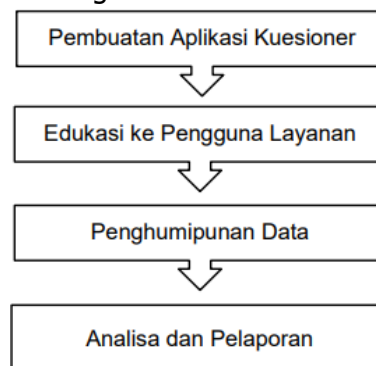
1. Mengetahui tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sesdep 3;
2. Menilai unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dari Sesdep 3;
3. Mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan Kemenpora.
5. Mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan Kemenpora.
7. Mendorong setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
8. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja pelayanan Kemenpora.

Berikut adalah pertanyaan dalam survei:

No	Pertanyaan	Akronim	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Persyaratan	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tidak mudah	Kurang mudah	Mudah	Sangat mudah
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	Waktu Penyelesaian	Tidak cepat	Kurang cepat	Cepat	Sangat cepat
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	Biaya/Tarif	Sangat mahal	Cukup mahal	Murah	Gratis
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	Kompetensi Pelaksana	Tidak kompeten	Kurang kompeten	Kompeten	Sangat kompeten
7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	Perilaku Pelaksana	Tidak sopan dan ramah	Kurang sopan dan ramah	Sopan dan ramah	Sangat sopan dan ramah
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan penquna layanan?	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Tidak ada	Ada tetapi tidak berfungsi	Berfungsi kurang maksimal	Dikelola dengan baik

9	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	Sarana dan Prasarana	Buruk	Cukup	Baik	Sangat baik	PUBLISH
---	---	----------------------	-------	-------	------	-------------	---------

Adapun sasaran responden survei adalah masyarakat yang datang untuk melakukan konsultasi maupun koordinasi serta masyarakat yang telah menggunakan fasilitas publik Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Pelaksanaan SKM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan pelaksanaan SKM diawali dengan pembuatan aplikasi kuesioner yang dilakukan oleh Bagian Sisinfo Kemenpora. Selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner, tabulasi dan perhitungan serta analisis dan laporan. Proses pengisian kuesioner hingga analisis dan pelaporan dapat dilakukan oleh unit eselon II.

Pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui aplikasi <https://skm.kemenpora.go.id/>. Responden bisa menggunakan komputer atau laptop atau mengisi melalui perangkat elektronik pribadi. Hasil dari kuesioner yang berupa data entry kemudian diolah dengan program komputer/sistem database sehingga didapatkan perhitungan indeks.

Dalam beberapa kegiatan, pelaksanaan survei juga dilakukan secara manual karena pada saat tersebut dinilai lebih efisien. Setelah responden mengisi formulir manual kemudian diinput di aplikasi e skm oleh petugas.

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mendapatkan nilai 89,83 (sangat baik)

#	Unsur SKM	Total Skor	Indeks	Keterangan
1	Persyaratan	573	87,88	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	569	87,27	Baik
3	Waktu Penyelesaian	560	85,89	Baik
4	Biaya/Tarif	631	96,78	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	559	85,74	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	576	88,34	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	600	92,02	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	634	97,24	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	569	87,27	Baik
IKM			89,83	Sangat Baik

III.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output sama/lebih besar, atau persentase input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan.

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian bagi suatu Kementerian. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan untuk menggunakan anggaran secara optimal sehingga menghasilkan output yang maksimal dengan anggaran (input) yang diberikan. Nilai efisiensi anggaran dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Adapun rumusan perhitungan efisiensi anggaran yang digunakan yaitu:

$$efisiensi = \frac{input}{ouput} = \frac{\%RA}{\%CRO}$$

Efisiensi	Kategori	Keterangan
Efisiensi > 1	Kurang Efisien	belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia
Efisiensi < 1	Efisien	besarnya capaian kinerja melebihi dari anggaran yang dialokasikan

NO	INDIKATOR KINERJA	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (CI)	Realisasi Kinerja (CO)	E=CI/CO	Kategori
1	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp98.666.667	100%	100%	1	-
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp246.120.000	99,85%	112,67%	0,886	Efisien
3	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp17.666.667	100%	84%	1,190	Tidak Efisien
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp1.105.035.833	99,99%	96,85%	1,032	Tidak Efisien
5	Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp141.317.500	100%	104,41%	0,958	Efisien
6	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp183.333.333	100%	100%	1	-

NO	INDIKATOR KINERJA	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (CI)	Realisasi Kinerja (CO)	E=CI/CO	Kategori
7	Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp148.900.000	99,76%	100%	0,998	Efisien
8	Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp246.120.000	99,85%	100,31%	0,995	Efisien
9	Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp17.666.667	100%	93,99%	1,070	Tidak Efisien
10	Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp98.666.667	100%	100%	1	-
11	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp912.400.000	99,68%	100%	0,997	Efisien
12	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp189.966.667	99,65%	95,40%	1,046	Tidak Efisien
13	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK	Rp246.120.000	99,85%	102,25%	0,977	Efisien

NO	INDIKATOR KINERJA	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (CI)	Realisasi Kinerja (CO)	E=CI/CO	Kategori
	yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga					
14	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp98.666.667	100%	100%	1	-
15	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp141.317.500	100%	89,61%	1,116	Tidak Efisien
16	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp1.105.035.833	99,99%	99,81%	1,002	Tidak Efisien

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa jumlah indikator kinerja yang efisien dan tidak efisien adalah sama yaitu masing-masing 6 indikator. Masih terdapat 4 indikator kinerja yang memiliki nilai netral (efisiensi = 1). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kerja pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga masih harus ditingkatkan efisiensinya karena semakin tinggi nilai efisiensi suatu organisasi berarti semakin baik organisasi tersebut melakukan tugas fungsinya. Namun, penghitungan atas nilai efisiensi di atas belum bisa dikatakan 100% akurat dikarenakan antara Perjanjian Kinerja dengan Rincian Kertas Kerja Anggaran masih terdapat perbedaan nomenklatur dan tidak sinkronnya penggolongan Rincian Output beserta pagunya dengan masing-masing Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja sehingga ada beberapa Rincian Output dan pagunya dialokasikan untuk lebih dari 1 indikator kinerja, begitu pula sebaliknya.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia Aparatur

Tahun	% Capaian Kinerja	Jumlah SDM
2022	120%	24 orang
2023	129,80%	30 orang
2024	93,99%	30 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan kinerja antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun tersebut juga ada kenaikan jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Namun pada tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja menjadi 93,99%. Kesimpulannya, kenaikan jumlah SDM tidak berpengaruh secara konstan terhadap tingkat capaian kinerja Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Kondisi sumber daya manusia aparatur/pegawai di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2024 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

- Sebaran pegawai masih belum merata, masih terdapat tim kerja yang kekurangan pegawai dan tim kerja lain yang terlalu banyak pegawai. Hal ini mengakibatkan timpangnya beban kerja yang dialami oleh pegawai. Untuk itu diperlukan penyebaran pegawai secara merata sesuai kompetensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing tim kerja;
- Diperlukan pembinaan dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan sesuai tugas fungsi dan kemampuan masing-masing pegawai;
- Banyak pegawai yang telah melakukan uji kompetensi dan lulus pengangkatan pegawai fungsional namun untuk *plotting*/penempatan pejabat fungsional masih diperlukan kajian ulang dengan lebih memperhatikan kondisi sebenarnya pada masing-masing UKE II;
- Diperlukannya evaluasi berkala atas kompetensi masing-masing pegawai agar bisa melaksanakan tugas fungsi bagiannya secara maksimal;
- Diperlukan adanya *reward and punishment* sehingga SDM menjadi lebih serius dan peduli dengan tugas fungsinya di organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan kinerja ini merupakan wujud tertib administrasi, komitmen, transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan kewajiban dan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi pada unit kesesdepan.

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga disusun berdasarkan Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2024 sebagai pelaksanaan kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud tertib administrasi, komitmen, transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan kewajiban dan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi pada unit kesesdepan.

Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024 telah menunjukkan capaian kinerja dengan baik. Hal ini tercermin dari sinkronisasi antara kegiatan yang dirancang dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manajemen waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi yang dilakukan tampak dari produk yang dihasilkan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Meski begitu banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kinerja yang dihasilkan. Langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja yang dirumuskan pada bagian saran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

IV.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran sebagai Laporan Kinerja tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi

kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih baik termasuk persiapan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029;
3. Penerapan *reward and punishment* terkait dengan performa kinerja dari setiap ketercapaian indikator kinerja;
4. Perlunya evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Kedeputan Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Perlunya penyusunan Laporan Kinerja pada setiap triwulan agar bisa dianalisis lebih rinci dan diatasi lebih dini apabila ada indikator kinerja yang belum maksimal hasilnya.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Subiyono, S.H.
Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi
Jabatan : Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

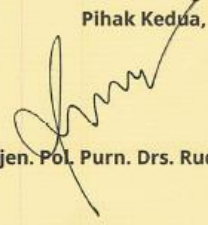
1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2024

Pihak Kedua,



Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Pihak Pertama,



Aris Subiyono, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	1.1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75
		1.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91
		1.4 Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92
		1.5 Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75
		1.6 Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.7 Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.8 Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	99%
		1.9 Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.10 Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
		1.11 Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%

1.12	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
1.13	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%
1.14	Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85
1.15	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90
1.16	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Anggaran Rp. 5.000.000.000

**Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga,**

Komjen. Pol. Purn. Drs. Rudy Sufahriadi

Jakarta, September 2024

**Sekretaris Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga,**

Aris Subiyono, S.H.

- Rencana Aksi 2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Target		Rencana Aksi	Data Pendukung	Keterangan
			Indikator Keberhasilan	Waktu Penyelesaian			
Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pengisian data pengadaaan dan diumumkan pada Website SIRUP	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan pengumuman pada SIRUP terkait paket penyedia, non penyedia, maupun swakelola yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian persentase pengumuman pengisian	Website SIRUP
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90	Tercapainya target nilai atas kinerja pelaksanaan anggaran	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan analisis dan perbaikan kinerja lebih lanjut di 8 indikator penilaian terutama pada bagian yang memiliki nilai rendah seperti devisi halaman DIPA IL, pelaksanaan dan pelunasan kontrak dan UPYTUP	Rincian atas penilaian IKPA per bulan	Website MONEVPA DJPB
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	91	Tercapainya target nilai atas kinerja anggaran	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan perbaikan kinerja anggaran terutama pada kegiatan Prioritas Nasional agar tidak menumpuk di akhir tahun	Rincian atas penilaian kinerja anggaran (NKA)	Website ESMART DJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	92	Tercapainya target indeks atas kepuasan masyarakat	Januari s.d. Desember 2024	Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan pada Deputi 3 kepada masyarakat Meningkatkan efektivitas penilaian SKM pada tiap unit Eselon II di Deputi 3	Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM)	Website E-SKM Kemopora
	Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	75	Tercapainya target rata-rata nilai atas pengawasan kearsipan di UKE II Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Juni-Juli 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait tata kelola kearsipan terutama pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Olahraga Disabilitas	Rincian atas penilaian atas kearsipan di UKE II Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penilaian kearsipan dari bagian kearsipan Kemopora dan ANRI
	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Penyediaan Data Keolahragaan Lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas penyediaan data	Desember 2024	Melakukan penyempaian penyediaan data kepada UKE II	Informasi kegiatan pada Deputi 3	Website, Instagram, JOPL, SISDI
	Tingkat Harmonisasi dan Penelaahan Produk Hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas harmonisasi dan penelaahan produk hukum	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II atas produk hukum yang akan dikeluarkan	Laporan atas pelaporan produk hukum yang dikeluarkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Koordinasi dan evaluasi dengan bagian Hukum Sekretariat
	Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	98%	Tercapainya target persentase atas serapan anggaran	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait langkah-langkah strategi penyerapan anggaran	Laporan atas realisasi anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pelaporan atas serapan anggaran
	Persentase Capaian Output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas realisasi capaian output	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pelaporan atas realisasi dan evaluasi capaian output	Laporan atas pelaporan capaian output berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada UKE II	Website Sakib dan MONEVPA DJPB
	Persentase BMN yang Terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pelaporan BMN	Desember 2024	Melakukan analisis terkait pengisian data dukung untuk pelaporan BMN Semesteran atau Tahunan	Penyampaian Laporan BMN ke Bagian BMN di Sekretariat Kemopora	Aplikasi SAKTJ Modul Asset dan Persediaan
	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	Tercapainya target persentase atas ASN yang diberikan pengembangan kompetensi	Desember 2024	Berkoordinasi dengan UKE II terkait pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pegawai pada tahun 2024	-	-
	Nilai PM SAKIP pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80	Tercapainya target nilai atas PM SAKIP	Januari 2024	Mengikuti review UKJ dengan APJP dan merindakani	BA Pemeriksaan PM SAKIP	APJP
	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang Ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80%	Tercapainya target persentase atas penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan pada LHP BPK	Desember 2024	Melakukan tindak lanjut hasil temuan BPK	LHP BPK sampai dengan 2022	Excel rangkuman temuan dan tindak lanjutnya
	Persentase Pengisian SIRUP yang Diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	100%	Tercapainya target persentase atas pengisian data pengadaaan dan diumumkan pada Website SIRUP	Januari s.d. Desember 2024	Melakukan pengumuman pada SIRUP terkait paket penyedia, non penyedia, maupun swakelola yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian persentase pengumuman pengisian	Website SIRUP
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85	Tercapainya target nilai atas pengawasan kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Juni-Juli 2024	Koordinasi dan evaluasi dengan bagian kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rincian atas penilaian atas kearsipan di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penilaian kearsipan dari bagian kearsipan Sekretariat Kemopora dan ANRI
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	90	Tercapainya target indeks atas kepuasan masyarakat	Januari s.d. Desember 2024	Meningkatkan kualitas pelayanan pada Sesdep 3 kepada masyarakat dan penerima layanan internal	Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM)	Website E-SKM Kemopora

- Evaluasi Rencana Aksi 2024

 Kementerian Pemuda dan Olahraga e-KINERJA ORGANISASI Senin, 20 Januari 2025								
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Polarisasi	Target	Satuan	Rencana Aksi	
1	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.01	Persentase pengisian SIRUP yang di umumkan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	%	1	Q
2	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.02	Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	88,00	%	1	Q
3	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.03	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	91,00	%	2	Q
4	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.04	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	92,00	%	3	Q
5	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.05	Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	73,00	%	2	Q
6	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.06	Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	Persentase	1	Q
7	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.07	Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	Persentase	1	Q
8	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.08	Persentase serapan anggaran pada Deputy bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	99,00	Persentase	3	Q
9	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.09	Persentase capaian output pada Deputy bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	Persentase	2	Q
10	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.10	Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	Persentase	1	Q
11	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.11	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	80,00	Persentase	1	Q
12	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.12	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	80,00	Nilai	1	Q
13	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.13	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	100,00	Persentase	1	Q
14	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.14	Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	85,00	Nilai	2	Q
15	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.15	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	90,00	Nilai	3	Q
16	SK 01. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional.	IKSK.01.16	Presentasi temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga (Approved) (IK Atasan : Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)	Maximize	80,00	Persentase	1	Q

- Matriks Cascading Data Pendukung Kegiatan

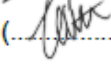
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 957	Layanan Hukum	148.900.000	1	0	0	0	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat	550.000.000	1	0	0	1	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 959	Layanan Protokol	1.843.405.000	2	0	0	2	2	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 959	Layanan Protokol							
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 962	Layanan Umum	282.635.000	1	0	1	1	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 962	Layanan Umum							
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBA	1720 EBA 994	Layanan Perkantoran	730.360.000	1	0	0	0	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBC	1720 EBC 957	Layanan Manajemen SDM	912.400.000	1	1	1	1	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBD	1720 EBD 952	Layanan Perencanaan dan P	53.000.000	1	0	0	0	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBD	1720 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	296.000.000	1	0	0	1	1	Layanan
Pusat	Non PN	418139-BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	35-Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1720 EBD	1720 EBD 961	Layanan Reformasi Kinerja	175.300.000	1	0	0	0	1	Layanan

TW 1 : perencanaan untuk pembahasan Juknis Fasilitas Bantuan Tarkam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan/Juklak/Juknis/SOP TW 2 : pembahasan Penetapan Lokasi Tarkam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan/Juklak/Juknis/SOP pd tanggal 13 Mei 2024 TW 3 : Pelayanan hukum dan kepatuhan internal dalam pelaksanaan Tarkam Bulan Juli 10 Daerah (Prov. Sulteng, Jateng, NTT, Sult, Jatim, Kalteng, Kalimantan, Sulawesi selatan), Agustus 19 daerah (Banten, Aceh, Sumbang, Babel, Jateng, Sult, NTB, Kalteng, DIY, Sumut, Bengkulu, Jabar, Bali, Papua Selatan, Kalimantan, Maluku), september 14 daerah (Jambi, Kabel, Riau, Papua Barat, Jateng, DIY, Babel, Jatim, Sumpul, Kaltim, Jabar, Kepri) TW 4 : Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal Oktober 14 Kab. Kota (NTT, Jambi, Banten, Kepri, Jabar, Maluku Utara, KAlbar, Jateng, Sumut, Sulteng, Aceh, Bengkulu, Sultra, November 4 Kab. Kota (DKI Jakarta, Sumut, Papua Tengah, Sulsel, Desember 4 Kab. Kota (Papua Barat, Lampung, Sulbar, Sumbang) Penetapan Peraturan Deputi No. 10.10.3 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Ordis TA. 2025. TW 1 : peluputan dan publikasi kegiatan di lingkungan Deputi 3 antara lain Pengembangan SDM, Festival Olahraga Disabilitas, dan Penulis JOPi TW 2 : Telah dilaksanakan kegiatan berupa peluputan dan publikasi kegiatan di lingkungan Deputi 3 berupa Kejuaraan Tarkam, konten motivasi olahraga, festival olahraga disabilitas, BIMTEK organisasi olahraga penyandang disabilitas dan FOD, penyusunan road map olahraga penyandang disabilitas, Juma TW 4 : 1. Terdapat 17 Berita, 28 Berita Foto dan 2 Ar kel kegiatan yang dipos ng di website Depu 3 selama bulan Desember. 2. Terdapat 33 konten yang di pos ng di Instagram Depu 3 selama bulan Desember. 3. Terdapat 4 konten yang di upload di Youtube Ayo Olahraga Channel selama bulan Desember. 4. Instagram Depu 3 mengalami kenaikan jumlah followers sebanyak 93 sehingga followers pada Instagram Depu 3 lenik adalah sebanyak 14.453 per 2 Januari 2025 5. Demografi Followers Instagram Depu 3 (diurutkan dari yang paling banyak): --- Pria: 57,3%, Wanita: 42,6% Lokasi Populer: Jakarta, Bandung, Bekasi Usia: 25-34, 35-44, 18-24. 6. Konten terpopuler dari Instagram Depu 3 adalah pos ngan, diku dengan reels dan story. 7. Waktu paling ak f dari followers Instagram Depu 3 selama bulan Desember adalah hari Minggu di jam 18.00 WIB. 8. Pada bulan Desember, top comments Video Mo vasi Olahraga "Rini Patmawa Trampoline Dance" : 1.056 views, 47 likes, dan 11 comments. 9. Pada bulan Desember top pos ngan dengan view dan engagement (like/comments)0 terbanyak adalah: ... Pos ngan mo vasi olahraga "Poppy Chris ne" : 5.463 views, 191 likes, dan 30 comments. Pos ngan konten foto "Jurnal Krida 27 Desember Bersama PORSI" : 1.366 views, 81 likes, dan 4 comments. Pos ngan konten foto "Fes val Olahraga Disabilitas Bali di SLEN 1 Badung" : 1.223 views, 51 likes, dan 1 comments. 10. Subscriber Youtube mendapatkan kenaikan jumlah subscribers sebanyak 63 selama bulan desember. Sehingga total subscribers Youtube sampai 2 Januari 8.911 TW 1 : pendampingan Eselon I untuk menghadiri rangkaian kegiatan di lingkungan deputi 3 seperti di Bandung dan Cimahi TW 2 : Telah dilaksanakan pendampingan Eselon I dan Eselon II untuk menghadiri rangkaian kegiatan di lingkungan deputi 3 maupun di luar instansi seperti TARKAM, Festival Olahraga Disabilitas, dan yang lain TW 3 : Telah dilaksanakan pendampingan Eselon I dan Eselon II untuk menghadiri rangkaian kegiatan di lingkungan deputi 3 maupun di luar instansi seperti TARKAM, Festival Olahraga Disabilitas, dan yang lain TW 4 : Telah dilaksanakan pendampingan Eselon I dan Eselon II untuk menghadiri rangkaian kegiatan di lingkungan deputi 3 maupun di luar instansi seperti TARKAM, Festival Olahraga Disabilitas, dan yang lain TW 1 : penjamuan kunjungan tamu dan audiensi, persiapan pelaksanaan pengarsipan terutama arsip keuangan dan persuratan pada bulan 5 Januari 2024 Audiensi dari Dispora Kota Bukit Tinggi, 10 Januari 2024 Audiensi dari Dibudporapar kabupaten Grobogan, 11 Januari 2024 Audiensi dari Porturin, 12 Ju TW 2 : Terdapat jamuan deputi dalam melakukan audiensi dari dinas pemuda dan olahraga daerah, dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Persiapan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip, belanja bahan labelling dan odner, tanggal 24 April Audiensi DPRD Kab. Belitung, 25 dai Dispora Pemprov. Maluku UI TW 3 : Terdapat jamuan deputi dalam melakukan audiensi dari dinas pemuda dan olahraga daerah, pelaksanaan pengelolaan Arsip 11 Juli Audiensi Disdikpora Kab. Kulon Progo, 17 Juli Audiensi terkait aturan baru permohonan rekomendasi kegiatan oleh Kemenpora, 22 Juli Audiensi dari Garuda TV, 22 Ju TW 4 : Terdapat jamuan deputi dalam melakukan audiensi dari dinas pemuda dan olahraga daerah, pelaksanaan pengelolaan Arsip tanggal 23 Oktober Audiensi Dispora Kota Jambi, 6 Oktober Jukuksu Tradisional Indonesia, 9 Oktober dari Indonesia FUII Taekwondo, 10 Oktober Tapak Suci Putra Muhamm TW 1 : Telah dilaksanakan pelayanan berupa layanan keuangan dan perbendaharaan TW I pada salter 418139 untuk Honor KPA, PPK, Pengelola Keuangan, BP BPP yang dibayarkan setiap bulan, dan pembalian ATK TW 2 : Belanja Bahan dan Belanja Honor Operasional dan Pemeliharaan Kantor Telah dilaksanakan pelayanan berupa layanan keuangan dan perbendaharaan TW 2 pada salter 418139 untuk Honor KPA, PPK, Pengelola Keuangan, BP BPP yang dibayarkan setiap bulan, dan pembalian ATK TW 3 : Belanja Bahan dan Belanja Honor Operasional dan Pemeliharaan Kantor Telah dilaksanakan pelayanan berupa layanan keuangan dan perbendaharaan TW 3 pada salter 418139 untuk Honor KPA, PPK, Pengelola Keuangan, BP BPP yang dibayarkan setiap bulan, dan pembalian ATK TW 4 : Belanja Bahan dan Belanja Honor Operasional dan Pemeliharaan Kantor Telah dilaksanakan pelayanan berupa layanan keuangan dan perbendaharaan TW I pada salter 418139 untuk Honor KPA, PPK, Pengelola Keuangan, BP BPP yang dibayarkan setiap bulan, dan pembalian ATK TW 1 : Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan pegawai di lingkungan deputi 3 di Bandung pada tanggal 2-4 Maret 2024 dengan jumlah peserta sekitar 150 orang TW 2 : Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan pegawai berupa pelatihan kemandirian di lingkungan deputi 3 di Jakarta pada tanggal 5-6 Juni 2024 TW 3 : Sosialisai Jabatan Fungsional Perencana dan Analisis Kebijakan tanggal 30 Oktober 2024 TW 4 : Monitoring dan evaluasi pada pelatihan SDM dan Persiapan Pengembangan SDM Sesdep pada Bulan Januari 2025 TW 1 : Telah dilaksanakan perencanaan berupa rapat Dialog Kinerja persiapan pelaksanaan pencairan di lingkungan deputi 3 tahun 2024 pada tanggal 16 Januari 2024 dan revisi anggaran RPD dan POK 3. Pada tanggal 16 Januari 2024 Penandatanganan PK Tahun 2024 Eselon 1 dan 2. Tanggal 10 Janua TW 2 : Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Manual IKJ Tahun 2024 tanggal 14 Mei. Persiapan perencanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi TUP 4 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 TW 3 : Persiapan perencanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester 1 tanggal 9 Juli 2024 TW 4 : Persiapan pelaksanaan penyusunan LKJ Tahun 2024 di Bulan Januari 2025. Pada Tanggal 31 Oktober Sosialisai Penyusunan Rencana Kerja KL dan Rencana Strategis. TW 1 : Telah disusun draft laporan keuangan audited 2023 TW 2 : Telah dilaksanakan penyusunan draft Laporan Keuangan tahun TW 1 TW 3 : penyusunan draft Laporan Keuangan untuk Semester 2. Percepat Daya Serap, Deputi 3 Kemenpora Adakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 TW 4 : Persiapan pencetakan laporan keuangan semester 2 TW 1 : Telah dilaksanakan rapat tentang pembentukan Satgas SPIP dan pendampingan RB di unit Eselon II TW 2 : Telah dilaksanakan adanya SK Satgas SPIP dan pendampingan RB di lingkungan Deputi 3, Persiapan pengisian KK SPIP di lingkungan Kemenpora, Telah dilakukan pengisian KK SPIP Deputi 3 dan Bukti Evidence KK pada Tanggal 13,14,15 Juni 2024 TW 3 : pengisian KK SPIP di lingkungan Kemenpora bersama BPKP TW 4 : Pengisian MR dan SPIP, Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Pengendalian internal dalam monitoring dan evaluasi TW IV
--

BERITA ACARA
**VERIFIKASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR: AK.01.00/403/2024

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan, Tim Verifikator ANRI telah melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dalam bentuk audit kearsipan internal.
2. Jumlah objek pengawasan yang dilaksanakan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebanyak 24 (dua puluh empat) objek pengawasan. Verifikasi nilai dilaksanakan terhadap 6 (enam) Unit Pengolah.
3. Hasil verifikasi nilai terhadap objek pengawasan sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.
4. Nilai pengawasan kearsipan yang telah diverifikasi ANRI agar ditetapkan oleh pejabat berwenang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dicantumkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal pada masing-masing objek pengawasan.
5. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia agar menyampaikan LAKI Konsolidasi ke ANRI sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Menyetujui Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia,		Tim Pengawas Kearsipan Pusat selaku Tim Verifikator,	
1. Dadang Ahmad Firdaus	(..... )	1. Nia Pertiwi	(..... )
		2. Nurbaiti	(..... )

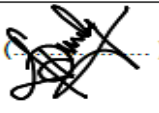
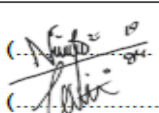
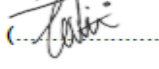
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TERVERIFIKASI TAHUN 2024

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI USULAN	NILAI VERIFIKASI
I	Sekretariat Utama		
1	Inspektorat	92,37	92,37
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	86,23	76,53
3	Biro Hukum dan Kerjasama	66,72	66,72
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	84,06	84,06
II	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		
5	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	92,68	92,68
6	Asisten Deputi Karakter Pemuda	88,10	88,10
7	Asisten Deputi Wawasan Pemuda	85,65	85,65
8	Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda	89,84	80,67
9	Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	90,46	90,46
10	Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda	89,34	89,34
III	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		
11	Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda	83,30	83,30
12	Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda	84,53	84,53
13	Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda	88,58	88,58
14	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	88,51	85,01
15	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	89,66	89,66
IV	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		
16	Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga	88,85	76,17
17	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	87,34	87,34
18	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	87,60	87,60
19	Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas	62,13	62,13
V	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		
20	Sekretaris Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga	71,23	71,23
21	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi	27,85	27,85
22	Asisten Deputi Olahragawan Andalan	49,00	49,00
23	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	79,50	71,77

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI USULAN	NILAI VERIFIKASI
24	Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	93,45	88,69

Menyetujui Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia,		Tim Pengawas Kearsipan Pusat selaku Tim Verifikator,	
1. Dadang Ahmad Firdaus	()	1. Nia Pertiwi	()
		2. Nurbaiti	()

- IKPA 2024 (Triwulan 1)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	33.60	78.40	100%	0.00	78.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	8.40				
					Nilai Aspek	83.34		100.00				33.60				

- IKPA 2024 (Triwulan 2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	60.86	73.48	100.00	100.00	91.65	90.70	85.66	100%	0.00	85.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.13	14.70	10.00	10.00	9.17	22.67				
					Nilai Aspek	80.43		91.28				90.70				

- IKPA 2024 (Triwulan 3)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	58.05	74.79	100.00	56.25	71.65	96.10	80.48	100%	0.00	80.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.71	14.96	10.00	5.63	7.17	24.03				
					Nilai Aspek	79.03		75.67				96.10				

- IKPA 2024 (Triwulan 4)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	58.51	81.07	100.00	64.00	83.28	94.91	83.45	100%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.78	16.21	10.00	6.40	8.33	23.73				
					Nilai Aspek	79.26		82.09				94.91				

- Detail Capaian Output



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	01	25	800.00	32.00	0.00	22.40
2	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	02	25	900.00	36.00	0.00	25.20
3	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	03	25	1,200.00	48.00	0.00	33.60
4	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	04	25	1,682.95	67.32	100.00	77.12
5	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	05	25	1,814.78	72.59	100.00	80.81
6	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	06	25	2,167.84	86.71	100.00	90.70
7	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	07	25	2,034.06	81.36	100.00	86.95
8	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	08	25	2,366.43	94.66	100.00	96.26
9	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	09	25	2,360.86	94.43	100.00	96.10
10	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	10	25	2,257.73	90.31	100.00	93.22
11	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	11	25	2,230.50	89.22	100.00	92.45
12	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	12	25	2,318.20	92.73	100.00	94.91

• Dokumen MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional)

Unit Pemilik Risiko : Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
Periode : 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal)	Unit Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja bersih, akuntabel, dan profesional	1.1. Persentase pengisian SIRUP	Pemutakhiran RKA pada aplikasi SIRUP oleh admin KPA	Risiko Operasional	SES3-RO1	Gagal pengunggahan	Server SIRUP sedang maintenance	Tertundanya tagging paket RUP	Eksternal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Sisinfo Kemenpora
2			Pendelegasian RKAKL ke masing-masing PPK di unit eselon 2 oleh admin KPA	Risiko Operasional	SES3-RO2	Admin PPK unit A salah klik kode unit menjadi kode unit B	Terdapat 1 akun PPK untuk dua unit eselon 2	Membuat bingung admin PPK unit A dan juga admin PP unit B	Internal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
3			Tagging dan melengkapi detail seluruh paket (penyedia/swakelola) oleh masing-masing PPK unit eselon 2	Risiko Kebijakan	SES3-RB1	Pengeditan/revisi paket masing-masing admin PPK	Revisi internal di masing-masing PPK	Paket direvisi, dikembalikan menjadi draft, lalu paket revisi tersebut difinalisasi dan minta diumumkan kembali lewat akun admin KPA	Internal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
4			Finalisasi draft seluruh paket oleh masing-masing PPK unit eselon 2	Risiko Kepatuhan	SES3-RP1	Terhambatnya pelaksanaan MoU	Petugas Administrasi kurang memperhatikan jadwal proses di SIRUP		Internal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
5			Masing-masing PPK unit eselon 2 bersurat untuk pengumuman paket ke KPA	Risiko Kepatuhan	SES3-RP2	Nota dinas pengumuman paket tidak disampaikan disposisinya ke admin KPA	Miskomunikasi di bagian TU KPA	Pengumuman paket RUP terhambat	Internal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
6			Seluruh paket RUP unit eselon 2 diumumkan oleh admin KPA	Risiko Kepatuhan	SES3-RP3	Didapati admin PPK unit eselon 2 terlambat mengirimkan nota dinas pengajuan pengumuman	Terlalu banyak revisi sehingga banyak paket yang dibatalkan dan dikembalikan menjadi draft	Paket tidak terumumkan 100%	Internal	Unit Eselon 2 pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
7		1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Olahraga	Penyusunan RPD bulanan	Risiko Operasional	SES3-RO3	Kurangnya konsistensi antara perencanaan dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga menyebabkan terjadinya deviasi dan keterlambatan penyampaian dokumen kontrak kepada KPPN	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat dari seringnya revisi DIP, ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan pelaksanaan penarikan, kesalahan pengajuan SPM	Penurunan kinerja	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3, Biro SDMO dan Inspektorat
8		1.3. Nilai Kinerja Anggaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pengisian Realisasi Kinerja Satker; pelaksanaan pemutakhiran RPD halaman III DIP	Risiko Kebijakan	SES3-RB2	Kurangnya komitmen dan konsistensi dalam menetapkan rencana anggaran dan kinerja dalam	Kebijakan internal, ketidaksesuaian antara target kinerja dan realisasi kinerja, revisi anggaran	Penurunan kinerja	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3, Biro SDMO dan
9		1.4. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pemberitahuan pengisian e-SKM terhadap tamu/stakeholder sepanjang tahun berjalan	Risiko Operasional	SES3-RO4	Sulit mendapatkan Token	Ada masalah di sistem/server	Responden tidak dapat mengisi e-SKM	Eksternal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3 dan Sisinfo Kemenpora
10			Pengisian oleh tamu/stakeholder sepanjang tahun berjalan	Risiko Operasional	SES3-RO5	Tampilan awal form option unit tidak bisa dibuka atau	Ada masalah di sistem/server	Responden tidak dapat mengisi e-SKM	Eksternal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3

24			Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Risiko Operasional	SES2-RO6	Materi pengembangan kompetensi tidak sesuai perencanaan	Kurangnya koordinasi dengan pemateri dan pihak penyelenggara pengembangan kompetensi	Output kompetensi yang ingin dikembangkan tidak tercapai	Internal dan eksternal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3 dan penyelenggaraan pelatihan, narasumber
25			Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Risiko Operasional	SES2-RO7	Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai tidak dilakukan dengan baik	Terbatasnya waktu panitia	Tidak adanya proses perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya	Internal	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
26		1.12. Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Penyusunan laporan	Risiko Kepatuhan	SES3-RP9	Penyusunan Laporan Kinerja belum konsisten dengan batas waktu yang ditentukan	Asupan data capaian kinerja terlambat dan tidak lengkap	Penurunan Kinerja	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3, Biro
27		1.13. Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Tagging dan melengkapi detail seluruh paket (penyedia/swakelola) oleh masing-masing PPK unit eselon 2	Risiko Kebijakan	SES3-RB8	Pengeditan/revisi paket masing-masing admin PPK	Revisi internal di masing-masing PPK	Paket direvisi, dikembalikan menjadi draft, lalu paket revisi tersebut difinalisasi dan minta diumumkan kembali lewat akun admin KPA	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3, Biro Perencanaan dan Keuangan dan
28		1.14. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Penciptaan arsip di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko Kepatuhan	SES3-RP10	Penciptaan arsip tidak sesuai dengan Aturan Tata Naskah Dinas Kemempora	Pencipta Arsip kurang kompeten	Arsip yang dihasilkan tidak sesuai dengan aturan tata naskah dinas	Internal	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Ketua Tim Kehumasan
29			Pengelolaan arsip aktif di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko Kepatuhan	SES3-RP11	Pengelolaan arsip tidak sesuai dengan Aturan Pengelolaan Arsip Aktif Kemempora	Pengelola Arsip kurang kompeten	Pengelolaan arsip aktif tidak sesuai dengan aturan	Internal	Seluruh unit di Satker Deputy 3
30			Penghapusan Arsip di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko Kepatuhan	SES3-RP12	Tidak ada pemindahan arsip inaktif dan usulan penghapusan arsip inaktif	Pengelola arsip kurang kompeten	Arsip inaktif tetap disimpan dan tidak dihapuskan sehingga memenuhi ruang	Internal	Seluruh unit di Satker Deputy 3
31			Penghapusan Arsip Inaktif dan Usulan Penghapusan Arsip di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko Kebijakan	SES3-RB9	Tidak ada pemindahan arsip inaktif dan usulan penghapusan arsip inaktif	Adanya penghentian penerimaan pemindahan arsip inaktif dari Bagian Tata Usaha Kemempora	Arsip inaktif tetap disimpan dan tidak dihapuskan sehingga memenuhi ruang	Eksternal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3
32		1.15. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pemberitahuan pengisian e-SKM terhadap tamu/stakeholder sepanjang tahun berjalan	Risiko Operasional	SES2-RO7	Sulit mendapatkan Token	Ada masalah di sistem/server	Responden tidak dapat mengisi e-SKM	Eksternal	Seluruh unit di Satker Deputy 2 dan Sisinfo Kemempora
33			Pengisian oleh tamu/stakeholder sepanjang tahun berjalan	Risiko Operasional	SES2-RO8	Tampilan awal form option unit tidak bisa dibuka atau	Ada masalah di sistem/server	Responden tidak dapat mengisi e-SKM	Eksternal	Seluruh unit di Satker Deputy 2 dan
34			penyusunan laporan e-SKM unit Sesdep dan satker Pembudayaan	Risiko Operasional	SES2-RO9	Data dari web e-SKM tidak dapat ditarik	Ada masalah di sistem/server	Keterlambatan penyusunan laporan	Eksternal	Seluruh unit di Satker Deputy 2 dan
35		1.16. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	Risiko Kepatuhan	SES3-RP13	Oknum sengaja melarikan diri	Kurang memiliki rasa tanggung jawab	Tindak lanjut tidak tuntas	Internal & eksternal	Seluruh unit Eselon 2 pada Deputy 3, inspektorat dan BPK
36				Risiko bencana	SES3-RB9	Kegagalan sistem penagihan	Terjadi keadaan kahar/kebakrutan/kematian	Mencari alternatif sistem penagihan baru	Internal & eksternal	Seluruh unit Eselon 2 pada Deputy Bidang 3, inspektorat dan BPK
37				Risiko Kepatuhan	SES3-RP12	Manipulasi keadaan yang bersangkutan	Untuk menghindari tuntutan	Pengembalian penyalahgunaan dana menjadi lebih lama	Internal & eksternal	Seluruh unit Eselon 2 pada3, inspektorat dan BPK

11		penyusunan laporan e-SKM unit Sesdep dan satker Pembudayaan	Risiko Operasional	SES3-RO6	Data dari web e SKM tidak dapat ditarik	Ada masalah di sistem/server	Keterlambatan penyusunan laporan	Eksternal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3
12	1.5. Rata - rata hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penciptaan arsip pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko kepatuhan	SES3-RP4	Penciptaan arsip tidak sesuai dengan Aturan Tata Naskah Dinas Kemempora	Pencipta Arsip kurang kompeten	Arsip yang dihasilkan tidak sesuai dengan aturan tata naskah dinas	Internal	Seluruh Unit Eselon 2 di Deputy 3 dan Biro Humas dan Umum
13		Pengelolaan arsip aktif di Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan	Risiko kepatuhan	SES3-RP5	Pengelolaan arsip tidak sesuai dengan Aturan Pengelolaan	Pengelola Arsip kurang kompeten	Pengelolaan arsip aktif tidak sesuai dengan aturan	Internal	Seluruh Unit Eselon 2 di Deputy 3 dan
14		Pengelolaan Arsip Inaktif dan Usulan Penghapusan Arsip di Sekretariat	Risiko kepatuhan	SES3-RP6	Tidak ada pemindahan arsip inaktif dan usulan	Pengelola arsip kurang kompeten	Arsip inaktif tetap disimpan dan tidak dihapuskan	Internal	Seluruh Unit Eselon 2 di Deputy 3 dan
15		Pengelolaan Arsip Inaktif dan Usulan Penghapusan Arsip di Sekretariat	Risiko kebijakan	SES3-RB2	Tidak ada pemindahan arsip inaktif dan usulan	Adanya penghentian penerimaan pemindahan	Arsip inaktif tetap disimpan dan tidak dihapuskan	Eksternal	Seluruh Unit Eselon 2 di Deputy 3 dan
16	1.6. Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data keolahragaan lingkup Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Pemohonan data atau informasi dari sekretariat Kemempora (data dapat beragam dapat berupa kebijakan, program kegiatan, progress perencanaan, pelaksanaan maupun yang telah dilaksanakan, data peserta kegiatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Tupoksi Deputi Bidang Pembudayaan)	Risiko Kebijakan	SES3-RB3	Pimpinan terlambat mendisposisikan surat permohonan data	Sistem persuratan Srikindi eror	Keterlambatan pengiriman data	Eksternal	Seluruh Unit Eselon 2 di Deputy 3 dan Biro Humas dan Umum serta Sisinfo kemempora
17		Penyediaan data oleh Deputi Bidang pembudayaan Olahraga	Risiko kebijakan	SES3-RB4	Data yang diminta tidak terdapat di Deputi Bidang pembudayaan Olahraga	Data yang diminta bukan termasuk dalam daftar mdata yang dihasilkan oleh unit	Data yang diminta tidak dapat diberikan	Internal	Seluruh unit di Satker Deputy 3
18	1.7. Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penyusunan Matriks inventarisasi Deregulasi Kebijakan di Lingkungan Deputi III Tahun 2024	Risiko Kebijakan	SES3-RB5	Tidak optimalnya pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan kebijakan di lingkungan Deputi III	Tidak teridentifikasinya regulasi yang sudah tidak relevan dan/atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Misinformasi dan diskordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis	Internal	Seluruh unit di Satker Deputy 3
19		Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Deputi, dan/atau Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga di Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Risiko Kebijakan	SES3-RB7	Tidak adanya regulasi yang mengatur terkait kebutuhan dukungan regulasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputi III	Tidak ada regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan	Pelaksanaan program tanpa dasar hukum/acuan yang jelas	Seluruh unit di Satker Deputi 3	Seluruh Unit Eselon 2 di Satker Deputy 3 dan Biro Hukum
20	1.8. Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Pembuatan SPP dan SPM	Risiko Kepatuhan	SES3-RP7	Tertundanya Pencairan akibat Revisi yang terlalu sering	Perencanaan Anggaran yang kurang matang sehingga menyebabkan seringnya terjadi Revisi Anggaran baik POK maupun Eksternal	Tertundanya pencairan	Internal	Seluruh Unit Eselon 2 di Satker Deputy 3 dan Biro Hukum
21	1.9. Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penginputan Capaian Output Bulanan berdasarkan realisasi pada masing-masing Unit	Risiko Operasional	SES2-RO4	Capaian Output tidak terinput secara akurat sehingga mengurangi nilai IKPA	Kurangnya koordinasi antara Pengelola Keuangan dengan Operator Komitmen terkait persentase realisasi yang tidak terupdate sebagai dasar pengisian Capaian Output Bulanan	Penurunan Kinerja	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputy 3 dan Biro Humas dan Umum
22	1.10. Persentase BMN yang terlaporkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Inventarisasi yaitu kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN	Risiko Kepatuhan	SES3-RP8	DBR per unit yang dikumpulkan tidak tepat waktu	Banyaknya barang yang berpindah dari ruangan unit maupun dari pengguna pribadi	Penurunan Kinerja	Internal	Seluruh unit Eselon 2 di Satker Deputi 3
23	1.11. Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Risiko Operasional	SES2-RO5	Terdapat beberapa jenis kompetensi yang tidak terdapat untuk dapat dikembangkan	Kurangnya kompetensi petugas dalam proses identifikasi	Pegawai tidak terpenuhi pengembangan kompetensinya	Internal	Seluruh unit di Eselon 2 Satker Deputi 3

- TOR RAB Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2024
<https://drive.google.com/drive/folders/1WVXE12IJXMBTqcxX7y1sBWd9H1SfLTmv>
- PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BPK

K 2021											
1	Pertanggungjawab an Balai Pengalaman Dinas Dalam Negeri Bekas Tertib	- BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar a. Menginstruksikan Kemempora untuk membuat SOP terkait ketentuan pertanggungjawaban pejabat di lingkungan Kemempora.	1	- PTL Semester II 2022 Memorandum Kemempora tgl 10 Agustus 2022 nomor PW.06.01.8.10.33-MENPORA/VII/2022 2 hal tidak lanjut hasil pemantauan tentang Instruksi kepada Kemempora untuk membuat SOP terkait ketentuan pertanggungjawaban pejabat di lingkungan Kemempora	0	1	0	0	0	Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, karena belum ada SOP terkait ketentuan pertanggungjawaban pejabat di lingkungan Kemempora	
		BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar b. Memerintahkan masing-masing KPA untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban pejabat dalam negeri.	1	- PTL Semester II 2022 Memorandum Kemempora tgl 10 Agustus 2022 nomor PW.06.01.8.10.33-MENPORA/VII/2022 2 hal tidak lanjut hasil pemantauan tentang Instruksi kepada masing- masing KPA untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban pejabat dalam negeri	1	0	0	0	0	Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi	
		BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar c. Menginstruksikan masing- masing KPA untuk memonitoring PPK di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja pejabat dan memedomani ketentuan yang berlaku.	1	- PTL Semester II 2022 Memorandum Kemempora tgl 10 Agustus 2022 nomor PW.06.01.8.10.33-MENPORA/VII/2022 2 hal tidak lanjut hasil pemantauan tentang instruksi kepada masing- masing KPA untuk memonitoring PPK di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja pejabat dan memedomani ketentuan yang berlaku	0	1	0	0	0	Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, karena KPA belum memonitoring masing-masing PPK melakukan pengujian belanja pejabat	

• PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BPK

		BPK merekomendasikan sistem Pemuda dan Olahraga agar: c. Menginstruksikan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga untuk: 1) Memonitorkan PPK Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO agar: a) Menarik kelebihan pembayaran pekerjaan penyisipan konsumsi pelatih SKO kepada penyedia sebesar Rp60.160.000 dan menyetorkan ke kas negara; b) Menarik kelebihan pembayaran Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Latihan Cabang Olahraga Angkat Besi sebesar Rp87.009.091 dan menyetorkan ke kas negara; c) Menarik kelebihan pembayaran akomodasi dan konsumsi atlet dan pelatih SKODI kepada penyedia sebesar Rp37.706.500 dan menyetorkan ke kas negara. 2) Memonitorkan BPP Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO agar: a) Menyetorkan kelebihan pemotongan PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp11.963.820 atas belanja sewa kendaraan SKODI; b) Mempertanggungjawabkan sisa	1	IDR 233.841,411	PTL SEMESTER II 2023 : a. Bukti Setor SSBP PT Global Bisnis Adi Satia NTPN No. 453AE6UNE1.ODCIBL tanggal 01 November 2023 sebesar Rp6.132.000,00. b. Bukti Setor SSBP PT Global Bisnis Adi Satia NTPN No. 03D4DUUE1P9G081 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp6.132.000,00.	1	233.841,411.00	0	-	0	-	0	Belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat nilai yang belum di setor sebesar Rp.138.000.000,00.	234.075.371,00	
LK 2022															
1 Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan		BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar : d. Menginstruksikan Deputi Pembudayaan Olahraga untuk: 1) Melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban pojadin dalam negeri; 2) Memonitorkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja pojadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku; 3) Memonitorkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp72.425.000 (Rp83.125.000 - Rp10.700.000) dan menyetorkan ke kas negara.	1	IDR 72.425,000	PTL SEMESTER II 2023 : a. Memorandum Menteri Pemuda Olahraga kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor PW.06.01/7.13.4/MENPORA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 untuk: 1) melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban pojadin dalam negeri; 2) memonitor PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja pojadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku; 3) memonitor PPK agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp72.425.000 (Rp83.125.000 - Rp10.700.000) dan menyetorkan ke kas negara. b. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran pojadin NTPN No. DUEDEUNTLUNNE1 tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp42.250.000,00. c. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran pojadin NTPN No. 4490A7QUUFVJHDI tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp2.875.000,00. d. Bukti Setor SSBP atas kelebihan pembayaran pojadin NTPN No. 70D9D61QQQT6A8U2 tanggal 4	1	IDR 72.425,000.00	1					Belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat instruksi dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kepada PPK dan BPP agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja pojadin dan mempedomani ketentuan yang berlaku.		
2 Penganggaran, Pelaksanaan Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Pemda dan Pelaporan Akuntabilitas Dana Dekonsentrasi Belum Memadai		BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar: b. Menginstruksikan Deputi Pembudayaan Olahraga untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Asdep Sentra dan SKO atas ketidakacematan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi;	1	IDR -	PTL SEMESTER II 2023 : a. Memorandum Menteri Pemuda Olahraga kepada Deputi Pembudayaan Olahraga Nomor PW.06.01/7.13.4/MENPORA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Asdep Sentra dan SKO atas ketidakacematan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi. b. Nota dinas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga kepada Asdep Pembinaan Sentra dan SKO Nomor PW.06.01/7.28.1/D-III-VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal teguran atas ketidakacematan dalam penyusunan alokasi anggaran dan laporan keuangan dana dekonsentrasi.	1							Tetap sesuai rekomendasi.		

Ayo
OLAHRAGA